



**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
RISET UNGGULAN DAERAH**

**STRATEGI TATA KELOLA KEBIJAKAN
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DAN RENTAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DI KOTA PEKALONGAN**

Tim Peneliti:

Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D

Dr. Drs. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum

Rona Utami, M.A.

Hendro Muhaimin, S.Fil, M.A.

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kegiatan Penelitian : Riset Unggulan Daerah
- Judul Penelitian : Strategi Tata Kelola Kebijakan Penanganan Anak Tidak sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan
2. Lembaga Pelaksana
- Nama : Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada
- Alamat : Jl. Podocarpus II D-22 Bulaksumur,Sleman, Yogyakarta 55281
- Telp./Fax/Email : ps.pancasila@ugm.ac.id
3. No. SPK : B/000.9/1243/VI/2024
4. Waktu Pelaksanaan : Juni – November 2024
5. Lokasi Penelitian : Kota Pekalongan
6. Peneliti :
- Ketua Tim : Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D
- Anggota : 1. Dr. Drs. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum
2. Rona Utami, M.A.
3. Hendro Muhaimin, S.Fil, M.A.
7. Sumber Anggaran : APBD Pemerintah Kota Pekalongan TA. 2024
8. Besar Anggaran : Rp.25.000.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Pekalongan, November 2024

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN

Ketua Tim Peneliti,

CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197507291994121001

Drs. Agus Wahyudi, M.Si.,

M.A., Ph.D

NIP. 196808041994031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini sebagai bagian dari pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024. Laporan ini disusun dengan tema kajian Strategi Tata Kelola Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan, yang merupakan respons terhadap pentingnya kebijakan afirmatif dalam memastikan layanan pendidikan bagi anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan.

Laporan Akhir ini menyajikan hasil dari berbagai tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Laporan ini meliputi latar belakang penelitian, tujuan, dan penjelasan kerangka acuan kerja, serta rincian metodologi dan rencana kerja yang digunakan. Setiap tahapan kegiatan, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi data, telah dilakukan secara sistematis dan terukur. Pada bagian akhir, laporan ini memaparkan hasil analisis data serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang berbasis data serta relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kota Pekalongan.

Kajian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak, khususnya bagi anak yang berisiko tinggi untuk tidak melanjutkan pendidikan. Melalui pemetaan kebijakan yang ada, kami berupaya untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang mencakup sistem informasi terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu mengenali dan melacak anak-anak yang tidak bersekolah, sehingga mereka dapat dibina dan didorong kembali ke jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan akurat dalam menangani isu anak tidak sekolah di Kota Pekalongan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas dan ketepatan hasil penelitian ini, kami mengedepankan metodologi yang ketat dan terstandarisasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan hasil yang diperoleh memiliki akurasi tinggi serta relevansi yang signifikan bagi tujuan penelitian. Kami menyadari bahwa hasil laporan ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pengembangan, terutama dalam tahap implementasi kebijakan yang akan melibatkan berbagai pihak terkait.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi dasar yang kokoh untuk pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai saran, kritik, dan masukan dari pemangku kepentingan dan pihak terkait demi penyempurnaan hasil penelitian ini di masa mendatang. Masukan yang berharga ini akan menjadi pedoman penting dalam mengoptimalkan penelitian serta dalam perancangan kebijakan yang lebih tepat sasaran di bidang pendidikan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan riset ini. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, dinas terkait, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerjasama yang sangat berarti selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pekalongan dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Pekalongan.

Pekalongan, Desember 2024

Tim Peneliti
Pusat Studi Pancasila UGM

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, permasalahan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan, adalah masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, dan faktor lainnya. Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan rentan putus sekolah tetap menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait. Untuk memahami lebih mendalam kompleksitas dan konteks lokal dari isu ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap proses implementasi inovasi lokal dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan, termasuk pemetaan peran dari berbagai pihak terkait. Melalui etnografi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi praktik baik serta keberlanjutan inovasi pembelajaran yang ada. Tahap awal penelitian akan melibatkan lokakarya dengan pelaku kebijakan, seperti Bappeda Kota Pekalongan untuk koordinasi kebijakan, dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan untuk teknis pelaksanaan, guna mendapatkan umpan balik atas kerangka dan instrumen penelitian agar selaras dengan kebutuhan di lapangan serta meningkatkan kualitas analisis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) dan wawancara terstruktur, yang bertujuan untuk menangkap perspektif dari narasumber utama mengenai implementasi kebijakan dan inisiatif lokal. Data primer ini dilengkapi dengan data sekunder, termasuk regulasi, kebijakan terkait ATS, dokumen inovasi, serta data tentang pendidikan dasar. Pendekatan etnografi ini mencakup snowball sampling untuk memastikan pemilihan narasumber yang relevan dan dapat memberikan wawasan mendalam. Harapannya, melalui identifikasi strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan, penelitian ini dapat menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor serta partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Penekanan pada tata kelola yang baik, pendanaan yang memadai, serta upaya pencegahan sejak dini menjadi elemen kunci dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikannya. Penelitian ini juga mendorong komitmen bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan individu untuk mengatasi tantangan ini demi mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kota Pekalongan.

Kata kunci: *Anak Tidak Sekolah (ATS), Tata Kelola Kebijakan, Inklusif dan Berkeadilan*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. RUANG LINGKUP	10
F. KERANGKA PIKIR/ALUR PIKIR	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. PROGRAM WAJIB BELAJAR	14
B. ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)	15
C. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA ATS	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. METODE PENELITIAN	20
B. WAKTU PENELITIAN	27
C. LOKASI PENELITIAN	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. KONDISI ATS BERDASAR KEWILAYAHAN DI KOTA PEKALONGAN	29
1. Kecamatan Pekalongan Barat	30
2. Kecamatan Pekalongan Timur	31
3. Kecamatan Pekalongan Utara	32
4. Kecamatan Pekalongan Selatan	33
5. Prioritas di Kelurahan	34
B. BEBERAPA ASPEK-ASPEK PENTING PENYEBAB ATS	39
1. Aspek Ekonomi	39
2. Aspek Budaya	43
3. Aspek Sosial	47
4. Aspek Layanan	52
C. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEKAN ANGKA ATS DAN ATAU ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKALONGAN	56
D. STRATEGI PENANGANAN ATS DAN ATAU ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKALONGAN	61

1. Desain Program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS	62
2. Bentuk Kelembagaan dari Inovasi Penanganan ATS	64
3. Pelaksanaan Pendataan pada Inovasi Penanganan ATS	65
E. PENGUATAN TATA KELOLA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN ATS	66
1. Peraturan Tata Kelola ATS	66
2. Anggaran	67
3. Kelembagaan Lintas Sektor	68
4. Sistem Pendataan	68
F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TATA KELOLA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN ATS	68
1. Intervensi pada Akar Masalah	68
2. Intervensi pada Tata Kelola Program	69
3. Faktor-Faktor Penghambat	70
BAB V PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. REKOMENDASI	74
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Strategi Kebijakan Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan	12
Gambar 3.1 Diagram Alur Studi Etnografi	22
Gambar 3.2 Jadwal Penelitian	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data ATS Kota Pekalongan	4
Tabel 1.2 Data Sebaran ATS Kota Pekalongan (Kecamatan)	6
Tabel 1.3 Data Sebaran ATS yang kembali ke Sekolah	7
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	28
Tabel 4.1 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Kewilayahan	29
Tabel 4.2 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Ekonomi	40
Tabel 4.3 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Budaya	44
Tabel 4.4 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Sosial	48
Tabel 4.5 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Layanan	52
Tabel 4.6 Inisiator, Roadmap, Institusi Pemimpin, dan Penyebaran Inovasi	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting sebuah bangsa dan amanat bangsa pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada UUD 1945 pasal 31, ayat 1 yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*", ayat 2 yang berbunyi "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*."

Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua warga negara, dan bukan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kondisi dasar yang dibutuhkan dari pembangunan yang menyasar pengentasan kemiskinan. Upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia salah satunya diawali dari akses terhadap pendidikan dasar yang setara bagi semua.¹ Pendidikan menjadi modalitas dalam mendorong kualitas tenaga kerja yang produktif, yang pada akhirnya diharapkan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam lapangan kerja, memperoleh upah yang layak, serta akhirnya berkesempatan untuk meningkatkan status sosial ekonomi.²

Melihat data nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kualitas hidup rakyatnya, termasuk melalui peningkatan akses layanan pendidikan dasar bagi semua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat penyelesaian pendidikan sekolah dasar (SD) menjadi 94 persen (2024) dari 91,8 persen, dan penuntasan pendidikan

¹ Haskins, R. (2013, May 13). *Three Simple Rules Poor Teens Should Follow to Join The Middle Class*. <https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-should-follow-to-join-the-middle-class/>

² Ford Foundation & Prakarsa. (2015). *Multidimensional Poverty Index Indonesia 2012-2014: Executive Summary*. https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/IndonesiaMPI_12_15_ExecSum.pdf

menengah pertama menjadi 89,49 persen dari 81,7 persen. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam aksi global capaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di mana pendidikan yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar seumur hidup bagi semua warga negara menjadi salah satu tujuannya (Target 4).³

Berdasar kajian di Kota Pekalongan, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2021 ada tiga belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.⁴

Faktor ekonomi dan konteks sosial masih menjadi kendala dalam upaya memastikan seluruh anak mengenyam pendidikan dasar. Susenas 2017 telah mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, baik dikarenakan ketiadaan biaya (28,5 persen) ataupun anak yang bekerja (20,6 persen). Konteks ekonomi semakin terlihat dengan semakin tingginya angka putus sekolah anak khususnya dari keluarga miskin dan tinggal di daerah pedesaan. Konteks sosial yang teridentifikasi dan menjadi kendala adalah persepsi bahwa pendidikan anak saat itu sudah cukup (8,4 persen), menikah dini (6,9 persen) dan anak dengan disabilitas (2 persen). Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, risiko anak perempuan untuk putus sekolah lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, proporsi ATS yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki, sedangkan proporsi ATS karena menikah lebih tinggi pada anak perempuan.⁵

Pemerataan layanan pendidikan sudah relatif baik yang ditandai oleh angka partisipasi kasar (APK) yang relatif tinggi, terutama pada jenjang dasar

³ Lihat Bab 4 pada RPJMN 2020–2024 tentang *Sasaran Utama Terpenuhinya Layanan Dasar*, Indikator Nomor 23.

⁴ Perubahan RKP Kota Pekalongan Tahun 2023, *Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023*, Halaman 146.

⁵ Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2017-2019.

yaitu: SD/MI 106,32%, SMP/MTs 92,06%, SMA/SMK/MA 84,53%, Pendidikan Tinggi 30,58% (Susenas 2020).⁶ Namun demikian, masih terdapat masalah penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak menempuh pendidikan di sekolah (ATS: Anak Tidak Sekolah), yang jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta anak. Hal ini disebabkan tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal. Selain kondisi geografis, beberapa masalah perlu ditanggulangi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab ATS, antara lain, isu anak bekerja, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dan anak/remaja dalam pernikahan. Dengan demikian, diharapkan layanan pendidikan menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Data ATS Kota Pekalongan saat ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasar hasil Validasi Awal Dindikcapil, Dinas Pendidikan, dan Kelurahan pada tahun 2024, jumlah ATS di Kota Pekalongan sebanyak 1.195 anak. Fokus penanganan ATS yang telah dilakukan antara lain melalui penyusunan RAD Penanganan ATS, Verifikasi Lapangan, dan Pengembalian Anak Tidak Sekolah ke sekolah. Terkait dengan fokus pengembalian Anak Tidak Sekolah, Pemerintah Kota Pekalongan memerlukan tinjauan dari perspektif anak tidak sekolah sehingga penanganan ATS tepat sesuai dengan harapan dan kebutuhan anak tersebut. Pengembalian Anak Tidak Sekolah untuk menempuh pendidikan baik secara formal ataupun informal diharapkan mampu dilakukan melalui observasi lapangan, yang dapat melihat faktor sosial, ekonomi bahkan psikologis yang mempengaruhi ATS untuk dapat kembali ke sekolah.⁷

⁶ Ibid. SUSENAS Tahun 2017-2019.

⁷ Buku Panduan Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Halaman 12-13.

Tabel 1.1 Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinasdik dan Kelurahan (2024)

No	Kecamatan	Validasi Capil	Validasi Dindik (Bersekolah)	Validasi Kelurahan				Sisa ATS	Sudah Dianalisis		Blm Dianalisis	
				Sekolah	Santri	Meninggal	Tdk Ketemu					
1	Kecamatan Pekalongan Barat	466	80	28	56	2	16	284	Pilih Kec	0	Pilih Kec	
2	Kecamatan Pekalongan Selatan	483	72	20	100	3	18	229	Pilih Kec	41	Pilih Kec	
3	Kecamatan Pekalongan Timur	373	63	22	41	1	10	205	Pilih Kec	31	Pilih Kec	
4	Kecamatan Pekalongan Utara	605	111	19	35	2	33	405	Pilih Kec	0	Pilih Kec	
Jumlah		1,927	326	89	232	8	77	1,195	1,123	72		

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Data lain, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memverifikasi 9.270 data anak putus sekolah untuk merumuskan kebijakan guna menekan angka anak putus sekolah. Untuk mendapatkan angka final pihaknya membenteng tim melakukan verifikasi. Temuan data 9.270 tersebut berawal dari data anak usia sekolah enam sampai 21 tahun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Pekalongan. Data Dindukcapil Kota Pekalongan, jumlah anak usia 6 tahun hingga 21 tahun 69.000 tersebar di 27 kelurahan. Selanjutnya data tersebut disesuaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data sistem informasi Kementerian Agama, *Education Management Information System* (Emis) dan data peserta pendidikan kesetaraan kejar paket yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.⁸

Berdasarkan data yang tersedia (lihat Tabel 1.1), Kota Pekalongan menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan total 1.195 anak yang masih belum kembali ke bangku sekolah. Dari empat kecamatan, Pekalongan Utara memiliki jumlah ATS tertinggi dengan 405 anak, disusul oleh Pekalongan Barat (284 anak), Pekalongan Selatan (270 anak), dan Pekalongan Timur (236 anak). Hasil validasi menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak bersekolah menghadapi kendala ekonomi, jarak sekolah yang jauh, serta kurangnya

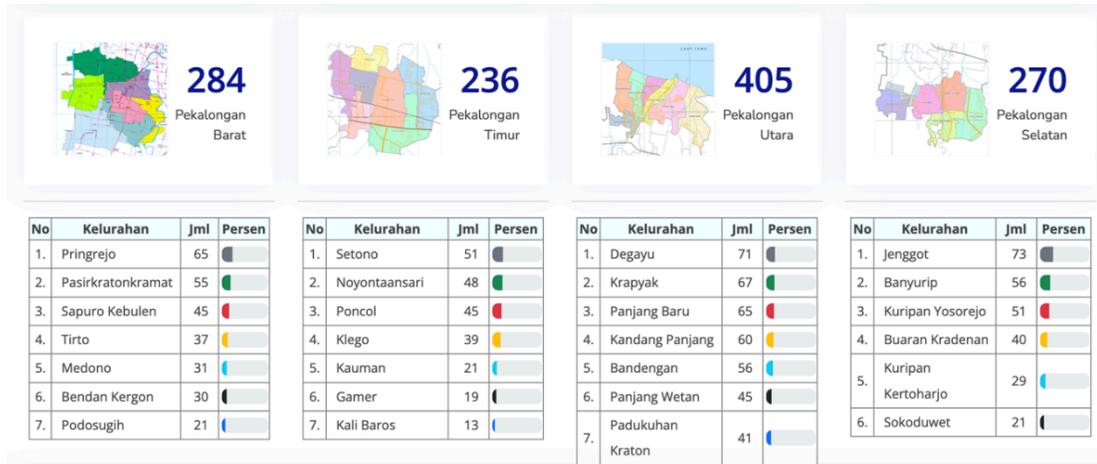
⁸ Diambil melalui <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0483955/data-9270-anak-putus-sekolah-diverifikasi>, dengan judul Data 9.270 Anak Putus Sekolah Diverifikasi.

dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Masalah ini diperparah dengan kondisi di beberapa wilayah pesisir, di mana anak-anak sering kali terdorong untuk bekerja membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan pendidikan.

Data terbaru yang didapatkan mengenai ATS ini, bahwa Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 ini sudah berupaya mengembalikan angka putus sekolah sebanyak 145 anak yang sempat putus sekolah (termasuk di luar usia sekolah), lihat tabel 1.3. Sedangkan anak tidak sekolah berusia 6-21 tahun disalurkan ke lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Pendataan di sekolah-sekolah di lingkungan Dindik maupun Kemenag dan Ponpes yang ada di Kota Pekalongan, terdapat 530 anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kota Pekalongan. Dari 530 itu kami kelompokkan lagi karena tidak semuanya berkeinginan kembali ke sekolah, akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk yang mau kembali belajar baik itu ke pendidikan formal dan non formal sebanyak 145 anak untuk ditangani dulu. Selanjutnya, kelompok yang berkebutuhan khusus maupun yang sudah bekerja paruh waktu dan tidak bersekolah. Sedangkan ketiga adalah mereka yang tidak minat bersekolah karena beberapa kondisi, misalnya harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga karena orangtuanya sudah tidak ada. Kami akan berkoordinasi dengan OPD lain untuk mencari solusi jalan keluarnya. Akan kami tangani bersama secara bertahap.⁹

⁹ *Tuntaskan Angka Putus Sekolah, Dindik Sekolahkan Kembali 144 Anak Putus Sekolah*, diakses melalui <https://pekalongankota.go.id/berita/tuntaskan-angka-putus-sekolah-dindik-sekolahkan-kembali-144-anak-putus-sekolah.html>

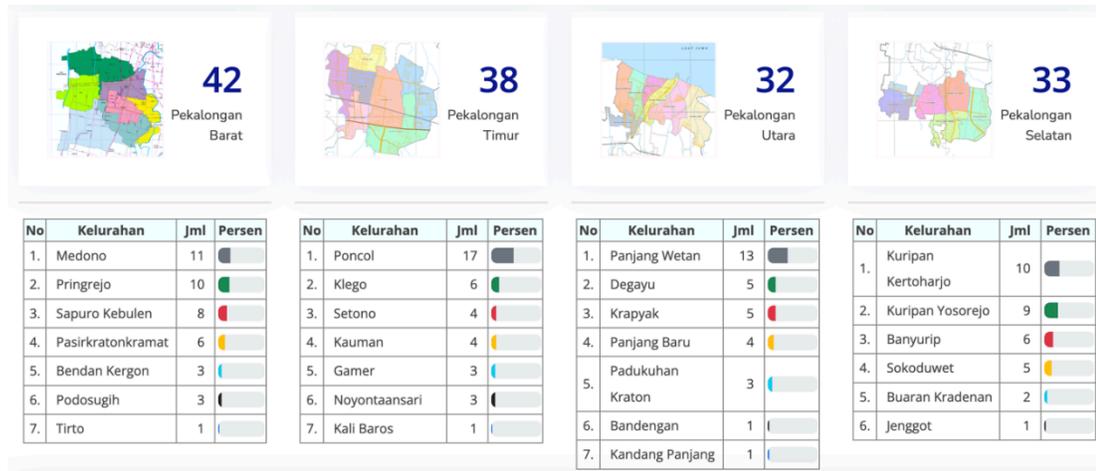
Tabel 1.2 Data Sebaran ATS Kota Pekalongan (Kecamatan) Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan (2024)



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Jika melihat tabel 1.2 diatas, telah memberikan gambaran bahwa sebaran ATS di Kota Pekalongan dari sisi jumlahnya dinilai cukup merata, hanya pada Kec. Pekalongan Utara saja yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan wilayah yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh biaya operasional pribadi yang cukup tinggi, ada pengaruh dari pribadi yang harus bekerja, dan adanya ketidakmampuan membayar sekolah. Adapun intervensi kebijakan saat ini mengenai anak putus sekolah maupun tidak sekolah akan di sekolahkan kembali baik di sekolah formal (SD, SMP, SMA) bagi yang usianya masih memenuhi syarat, maupun ke sekolah nonformal atau kesetaraan, khususnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Bagi yang memilih jalur kesetaraan di PKBM bisa langsung memulai proses pembelajaran menyesuaikan jadwal di PKBM masing-masing. Kesetaraan pendidikan non formal, kejar paket A, B, dan C, ijazahnya setara dengan pendidikan formal. Di masing-masing PKBM ada keterampilan yang diajarkan sehingga anak-anak bisa ikut kesetaraan sekaligus mengambil keterampilan, mayoritas memang kelas sore dan malam. PKBM ini juga sudah terakreditasi ijazahnya. Mulai tahun ini dimulai mengadvokasi Pokjar untuk berubah menjadi PKBM untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tabel 1.3 Data Sebaran ATS yang kembali ke Sekolah Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan (2024)



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Pekalongan menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah dengan angka ATS yang cukup tinggi yaitu 4346 anak (data 2019). Berikut rincian data Anak Tidak Sekolah di Pekalongan pada tahun 2019. Penanganan ATS terus diupayakan oleh Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pendidikan (Disdik), salah satunya melalui hadirnya pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola masyarakat atau lembaga kursus. kehadiran SKB dan satuan pendidikan non formal lainnya selain kaitannya untuk meneruskan program pendidikan kesetaraan juga ada pemberdayaannya masyarakat yaitu memberikan pelatihan dan keterampilan, serta atau *soft skill*.

Untuk menanggulangi permasalahan ATS ini, diperlukan intervensi yang terfokus dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi strategis meliputi penyediaan bantuan ekonomi bagi keluarga rentan agar anak-anak tidak perlu bekerja, program transportasi sekolah bagi anak-anak di daerah terpencil, serta program penyuluhan dan motivasi belajar yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga. Di kecamatan seperti Pekalongan Utara dan Barat, misalnya, dukungan finansial dan program pemberdayaan ekonomi keluarga akan sangat membantu mengurangi angka ATS. Sementara itu, di wilayah dengan kendala jarak sekolah seperti Pekalongan Timur dan Selatan,

subsidi transportasi atau penyediaan bus sekolah dapat menjadi solusi efektif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan angka ATS dapat berkurang secara signifikan, membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi setiap anak di Kota Pekalongan.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan inovasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan?
 - a) Bagaimanakah program dan intervensi didesain (siapakah yang dilibatkan, proses yang terlaksana)?
 - b) Bagaimanakah profil ATS di masing-masing kelompok/Kelurahan?
 - c) Apa yang menjadi tujuan dari inovasi ATS di masing-masing kelompok/Kelurahan?
- 2) Apakah struktur kelembagaan telah disusun dengan tepat?
 - a) Apakah struktur kelembagaan khususnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berfungsi?
 - b) Bagaimana peran dari masing-masing aktor?
 - c) Apakah pelaksana program memiliki kapasitas yang mumpuni?
 - d) Bagaimana pembiayaan untuk program dialokasikan dan apakah memadai untuk mencapai target yang diharapkan?
- 3) Apakah pelaksanaan inovasi tersebut sesuai dengan harapan?
- 4) Perubahan apa yang telah terjadi dan dapat diamati?
 - a) Sistem dan prosedur (regulasi, anggaran, mekanisme dan SOP)
 - b) Sumber daya manusia (aktor yang terlibat dan peningkatan kapasitas)
 - c) Perubahan lainnya yang\ diamati oleh narasumber
- 5) Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian dari pelaksanaan inovasi tersebut, baik yang mendukung ataupun menghambat?

- 6) Bagaimanakah aspek inklusi gender dan sosial dipertimbangkan dan ditangani melalui program ini?
 - a) Apakah ada upaya khusus untuk ATS perempuan dan ATS dengan disabilitas?
 - b) Bagaimana hal ini dapat ditingkatkan?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan penelitian ini secara umum akan memaparkan beberapa upaya untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan, sebagai berikut:

- 1) Membuat Program/Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah, melalui kajian kebijakan mengenai afirmasi layanan pendidikan khusus untuk ATS yang tidak memungkinkan, misalnya bagi anak berkebutuhan khusus yang berasrama, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja/pekerja migran di luar negeri.
- 2) Menyediakan kajian berkaitan dengan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus (difabel) dan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3) Membuat rekomendasi berkaitan dengan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk dapat menemukenali anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berkaitan dengan Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah ini antara lain:

- 1) Tersedianya Program/Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan dengan pendekatan afirmasi layanan pendidikan khusus untuk ATS yang tidak memungkinkan, misalnya bagi anak berkebutuhan khusus yang berasrama, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja/pekerja migran di luar negeri.

- 2) Tersedianya kajian pemetaan tanggung jawab dan kewenangan lintas sektor untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dalam upaya penanganan ATS di Kota Pekalongan.
- 3) Memberikan acuan kerangka pikir strategi penanganan ATS dan panduan untuk Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan solusi penanganan ATS, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ditemukan di lokasi/Kelurahan masing-masing.
- 4) Membangun sistem dan menyiapkan kapasitas kelembagaan yang efektif untuk upaya pelaksanaan strategi penanganan ATS di Kota Pekalongan, seperti penyediaan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

E. RUANG LINGKUP

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah menemukan penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendekatan antropologi ataupun etnografi. Selain itu penelitian ini diupayakan untuk mengetahui metode penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tepat sasaran sesuai dengan penyebab dan kebutuhannya.

2. Lokasi Penelitian

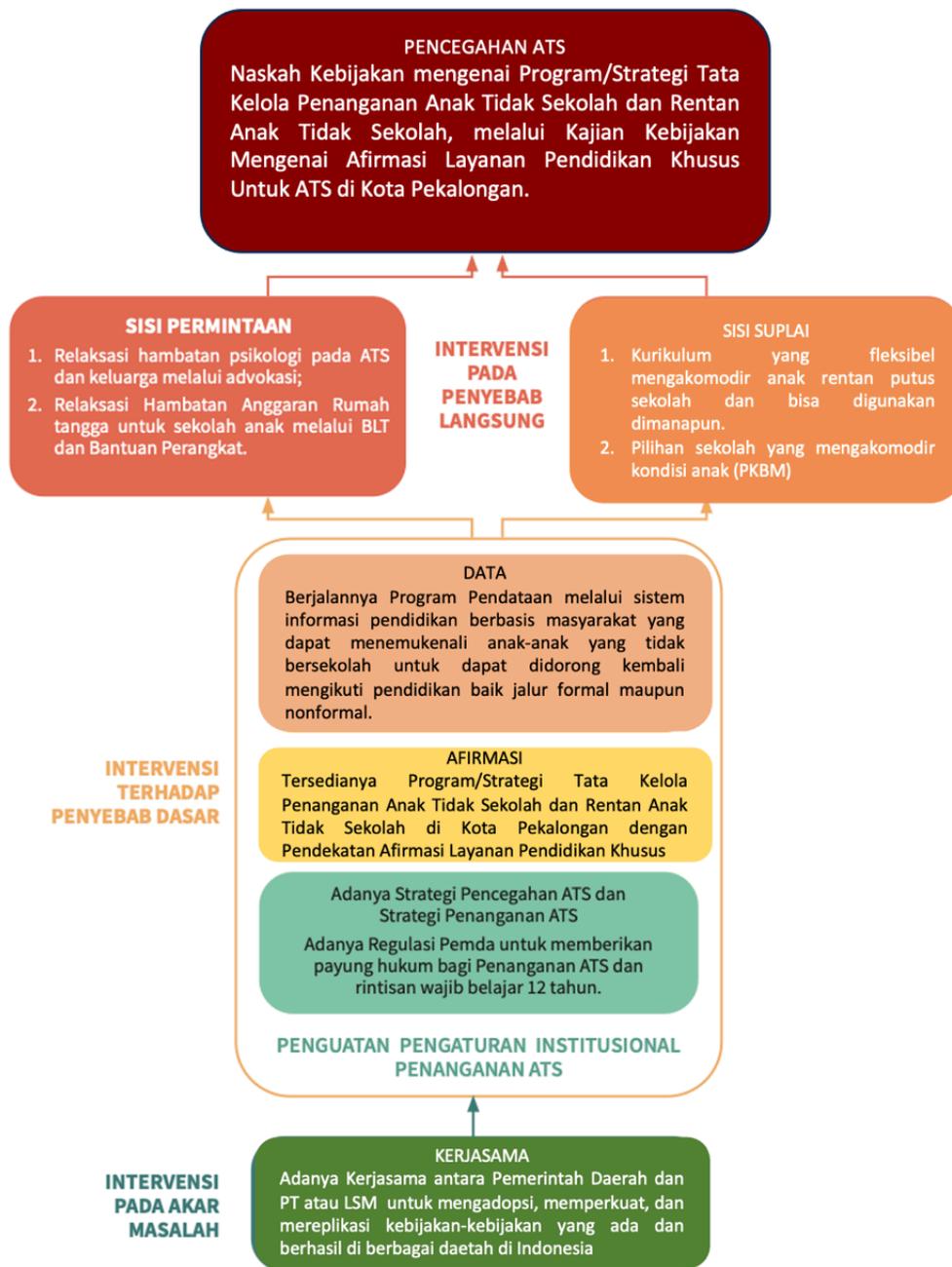
Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 6 bulan (Juni-Desember 2024) dimulai dari proses penyiapan proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisisioner, dan melakukan uji validitas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan, setelah itu baru menganalisa data dan penulisan laporan.

F. KERANGKA PIKIR/ALUR PIKIR

Kajian penelitian ini akan berupaya untuk mendokumentasi berbagai faktor yang memengaruhi alur pikir dalam menentukan strategi kebijakan mengenai Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan.

Pada Gambar 1.1 di bawah, berusaha mendukung inovasi lokal penanganan dan pencegahan ATS sudah ada yang berfokus pada perbaikan tata kelola, sehingga berimplikasi pada kualitas program, di antaranya:

- a) Adanya penguatan regulasi di level kota tentang penuntasan pendidikan 12 tahun dengan harmonisasi program lain untuk jenjang yang sama yang menjadi tanggung jawab Kab/Kota.
- b) Adanya kelembagaan program penanganan ATS yang dipimpin langsung oleh Bappeda untuk koordinasi kebijakan, dan Dinas Pendidikan untuk teknis pelaksanaan, seperti pendataan, proses pengembalian ATS ke sekolah, pemantauan, dan pelaporan.
- c) Tersedianya anggaran yang bersumber dari pemerintah kota, yang diperkaya oleh CSR dan sumber-sumber dana lain.
- d) Tersedianya sistem pendataan yang komprehensif dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan penanganan ATS.
- e) Tersedianya mekanisme dan prosedur penanganan ATS yang terdokumentasi, dengan cakupan mulai dari desain hingga pemantauan dan evaluasi keberhasilan inovasi.
- f) Adanya regulasi pendukung lainnya: Peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat/Lurah; Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Dana Kelurahan, terutama yang secara spesifik mengatur urusan pendataan dan penanganan ATS.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Strategi Kebijakan Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan

Meskipun program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS telah menunjukkan hasil yang diharapkan, kajian penelitian ini juga akan mengungkap beberapa faktor penghambat inovasi program dan tantangan, seperti:

- a) Kurangnya koordinasi lintas sektor.
- b) Masih belum harmonisnya regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait wajib belajar 12 tahun, sehingga penanganan ATS untuk rentang usia tertentu menjadi terkendala oleh regulasi dan anggaran.
- c) Untuk anak disabilitas tidak sekolah (ADTS), ditemukan kendala sisi suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, teridentifikasi masih lemahnya regulasi terkait berbagai hal, misalnya perekrutan guru, investasi sarana fisik untuk sekolah inklusi dalam melayani anak disabilitas tidak sekolah yang mayoritas belum pernah bersekolah. Sementara itu, dari sisi permintaan, ditemukan adanya hambatan psikologis pada anak dan orang tua khususnya untuk anak yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusi. Hal itu terjadi karena mayoritas ADTS belum pernah bersekolah sekalipun telah berusia remaja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PROGRAM WAJIB BELAJAR

Program wajib belajar merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib menyediakan dananya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Selanjutnya pada pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Selain amanat Undang-undang, pada dasarnya program wajib belajar merupakan tuntutan perubahan karena didasari konsep "pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak (Daliyo, 1998).

Dengan penyediaan akses yang sama bagi semua anak, maka setiap anak akan memperoleh peningkatan kemampuan bersaing dalam iklim global, sebab peningkatan mutu SDM pada tingkat penguasaan pendidikan dasar merupakan persyaratan minimum bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengenal peralatan elektronik, prinsip kerja mesin-mesin produksi dan pertanian, alat-alat rumah tangga yang diperlukan untuk membangun kehidupan modern dengan menggunakan teknologi dasar. Dengan demikian, program wajib belajar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Hal ini sejalan dengan komitmen negara-negara PBB untuk Education for All (EFA) di Jomtien tahun 1991 dan Dakar tahun 2000 berisikan enam tujuan utama, yaitu: (1) memperluas pendidikan untuk anak usia dini, (2)

menuntaskan wajib belajar untuk semua pada tahun 2015, (3) mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasa, (4) meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf pada tahun 2015, khususnya perempuan, (5) menghapuskan kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan (Muchtar, 2004). Komitmen ini tentunya juga mengikat Indonesia sebagai negara anggota PBB. Program wajib belajar sembilan tahun di Indonesia di mulai pencatangannya pada tahun 1994 dan ditargetkan penuntasannya pada tahun 2008.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar sembilan tahun: (1) lebih dari 80 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; (2) program wajib belajar sembilan tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi; (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari enam ke sembilan tahun, akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa; (5) peningkatan wajib belajar menjadi sembilan tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun (Daliyo, 1998). Jadi suksesnya pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun akan meningkatkan produktivitas kerja manusia Indonesia secara keseluruhan.

B. ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)

Anak tidak sekolah (ATS) merupakan sebuah kondisi sosial seseorang tidak pernah memasuki sebuah lembaga pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP dan jenjang pendidikan di atasnya. Anak yang tidak bersekolah dengan kriteria usia 6-21 tahun merupakan pengejawantahan dari kondisi anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), atau sering dikenal dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, (Nasruddin, 2012). Anak yang tidak sekolah merupakan permasalahan serius di semua negara, karena aspek sumber daya manusia sangat terkait dengan kelangsungan nasib suatu bangsa. Salah satu faktor penyebab pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun di setiap daerah cukup bervariasi terutama dilihat dari kemiskinan penduduk (Nur Berlian, 2011). Shabri (2014) menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di sebagian kabupaten/

kota di Aceh, khususnya di kabupaten yang baru dimekarkan telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat di kawasan tersebut sangat tinggi, yaitu melebihi 20 persen (melebihi tingkat kemiskinan nasional, 14,44 persen).

Menurut (Murnane, 2013) temuannya menjelaskan tiga pola mencolok dalam tingkat kelulusan siswa yang termasuk mengalami stagnasi selama tiga dekade terakhir abad kedua puluh berdasarkan; a) ras atau suku, b) mata pencaharian, dan c) berbasis jender selama dekade pertama abad 21, terutama di kalangan orang kulit hitam dan Hispanik di Amerika. Menurut Wijayanti (2012), beberapa variabel yang diduga menyebabkan putus sekolah yang digunakan yaitu status kemiskinan, pendidikan orang tua, jumlah anggota rumah tangga (ART), ketersediaan listrik, lokasi tempat tinggal, dan jenis lapangan usaha kepala rumah tangga (KRT). (Anas, Yulia dan Elfindri, 2009) bahwa akar permasalahan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan pada daerah-daerah yang beresiko terjadinya kegagalan Wajib 9 tahun sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 dalam rangka percepatan Wajib Belajar 9 Tahun, menekan angka putus sekolah, dan membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus sekolah (Kharisma, 2013). Keberhasilan sekolah usia dini tergantung pada banyak faktor seperti fungsi eksekutif, pengaturan diri, pengalaman, keterikatan orang tua, dan interaksi dengan guru dan teman sebaya (Irwanto, 2017).

Fitriana Nur Itsnaini dalam penelitiannya yang berjudul "Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta"? Bahwa penyebab anak putus sekolah didominasi oleh faktor internal, dimana anak malas untuk bersekolah selain itu juga kemampuan akademik anak yang kurang menjadi penghambat anak menerima pelajaran. Dalam sekripsinya juga Fitriana memaparkan bahwa faktor ekonomi juga menjadi alasan anak putus sekolah ketidak mampuan orang tua dalam menjangkau biaya anak sekolah dan faktor lingkungan yang tidak mendidik membuat anak terpengaruh kepada hal-hal negatif sehingga membuat anak ikut-ikutan malas datang ke sekolah.

Sedangkan menurut Drs. Slameto dalam bukunya yang berjudul "Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya", bahwa keadaan ekonomi

keluarga erat hubungannya dengan aktivitas belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku- buku, dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat dipenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Drs Slameto juga menjelaskan jika anak hidup dalam keluarga yang miskin dan tidak berkecukupan, maka kebutuhan pokok anak akan tertanggung sehingga akibatnya kesehatan anak terganggu dan belajar anak pun ikut terganggu. Karena dirundung rasa malu sehingga anak menjadi minder dengan teman lainnya. Bahkan mungkin anak harus mencari nafkah untuk membantu orang tua, padahal anak belum saatnya bekerja, hal inilah yang menyebabkan anak putus sekolah.

Sementara Purnomo Adi Saputro (2009) dalam penelitian yang berjudul, "Faktor-Faktor Penyebab Anak Usia Sekolah Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Studi kasus di Desa Pesantren Kecamatan Blado Kabupaten Batang)". Penelitian yang di susun oleh Purnomo Adi Saputro mengatakan bahwa faktor anak putus sekolah di pengaruhi oleh faktor ekonomi orang tua yang tidak dapat mendukung pendidikan anak mereka, selain itu juga orang tua beranggapan bahwa sekolah tidaklah begitu penting. Sehingga menghambat anak untuk mendapatkan pendidikan. Faktor aksesibilitas juga menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, karena jarak sekolah dengan rumah yang cukup memberikan rintangan, fasilitas jalan yang tidak baik dan tidak adanya transportasi yang dapat mengantar anak-anak untuk pergi sekolah.

Beberapa buku dan penelitian di atas sedikit banyak memberikan fokus kajian bagi penelitian ini. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang khas dengan penelitian terdahulu. Studi yang akan penulis lakukan adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak putus sekolah di Kota Pekalongan.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada terciptanya pemerataan dan keadilan, program wajib belajar yang telah

dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 1994 merupakan tonggak awal dari upaya mencapai pemerataan dan keadilan pada tingkat pendidikan yang semula wajib belajar 6 tahun (usia 7-12), ditingkatkan menjadi 9 tahun (usia 7-15) dan pada tahun 2015 standar ini kembali ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun (usia 7-18) dari jenjang SD sampai SMA. Namun pada kenyataannya hingga saat ini tentu saja tidak dapat dipungkiri bawa masalah putus sekolah masih saja terjadi di seluruh wilayah Indonesia secara umum atau di Kabupaten/Kota khususnya.

Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia dari Bappenas, bahwa mekanisme pelaksanaan Stranas ATS meliputi tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai ke desa. Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tim Teknis Penanganan ATS Daerah yang memiliki peran kunci dalam menginisiasi, mengembangkan, dan menerapkan Rencana Aksi Daerah penanganan ATS di Kecamatan. Adapun tanggung jawab tim teknis daerah meliputi:

- a) Mengembangkan dan meninjau data ATS, mengidentifikasi kelompok ATS serta faktor penyebab yang dominan berkontribusi pada isu ATS di daerah, baik pada tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.
- b) Mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan isu ATS di daerah.
- c) Memetakan layanan pendidikan dan pelatihan, dan kapasitas kelembagaan yang sudah tersedia di daerah, mengidentifikasi kesenjangan, dan potensi pemenuhannya.
- d) Memantau pelaksanaan program Pemerintah yang sudah berjalan yang berkontribusi langsung untuk penanganan ATS (misalnya berbagai bentuk bantuan sosial dan pendidikan, seperti PIP dan PKH).
- e) Mengembangkan Rencana Aksi Daerah untuk mengatasi masalah ATS secara keseluruhan di kecamatan atau desa/kelurahan yang menjadi daerah prioritas (misalnya desa dengan populasi ATS terbesar).
- f) Memastikan ketersediaan berbagai sumber daya termasuk dari segi peraturan kebijakan, program, dan penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan seluruh fase implementasi strategi penanganan ATS, termasuk pendataan ATS dan rencana aksi

penanganan ATS.

- g) Menerapkan strategi pendataan ATS yang sesuai, termasuk melakukan pelatihan (SIPBM) di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, melakukan pemutakhiran data terkait ATS secara periodik, dan pengintegrasian data pada tingkat satuan rumah tangga/desa (melalui SIPBM) dengan sistem informasi kesejahteraan sosial yang dikelola Pemerintah Pusat.
- h) Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan dan pemimpin desa/kelurahan untuk melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis data akurat, dan mengikut sertakan upaya pendataan dan penanganan ATS di dalam program dan anggaran pembangunan.
- i) Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa terkait penanganan ATS dan memberikan dukungan yang sesuai, termasuk memfasilitasi pembelajaran antar-desa/kelurahan.
- j) Mendukung, memfasilitasi, dan mengkoordinasi pelibatan masyarakat dalam seluruh fase perencanaan dan pelaksanaan strategi penanganan ATS di daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dipilih dalam proses penelitian untuk menelusuri proses implementasi dari empat inovasi lokal penanganan ATS yang disertai dengan pemetaan peran dari para pelaku terkait. Hammersley (1990) menyatakan 3 prinsip metodologis yang digunakan dalam corak metode etnografi diantaranya¹⁰:

- a) Naturalisme, bagian ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen.
- b) Pemahaman, bagian ini yang menjadi landasan utama adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Untuk itu meneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik dari pada meneliti yang masih asing agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya.
- c) Penemuan, bagian ini menegaskan bahwa penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian dimana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasar pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan namun menjadi nyata setelah dibuktikan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut.

Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi praktik baik beserta pembelajaran yang dapat dipetik untuk keberlanjutan inovasi tersebut ataupun inovasi serupa lainnya. Pada tahap awal akan diselenggarakan lokakarya dengan pelaku kebijakan yaitu Bappeda untuk koordinasi kebijakan, dan Dinas Pendidikan untuk teknis pelaksanaan. Lokakarya ini ditujukan

¹⁰ Dalam Genzuk (2005: 3) yang tersaji dalam buku Emzir “*Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*” (2011:149-152).

untuk mendapatkan umpan balik terhadap kerangka dan instrumen penelitian, untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas analisis.

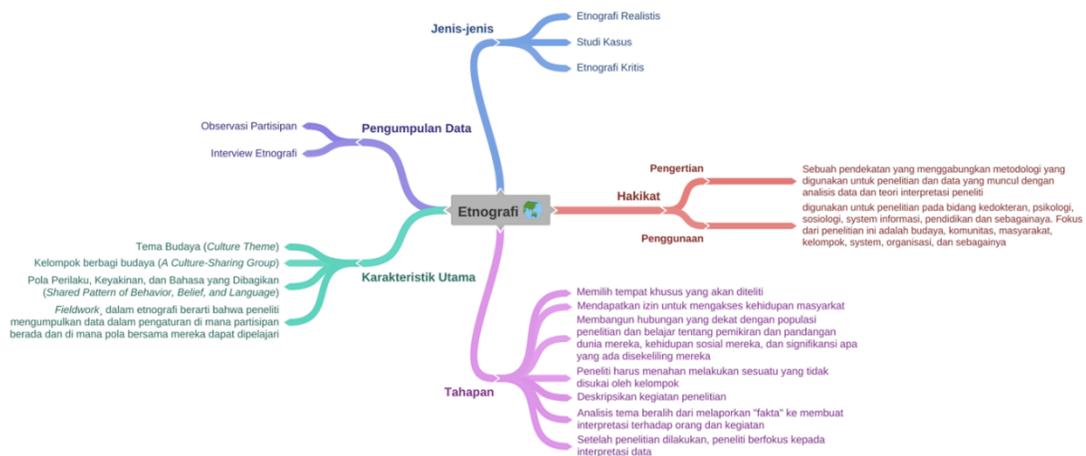
Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan dua metode yaitu diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*-FGD) dan wawancara terstruktur dengan narasumber utama. Data primer ini kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang mencakup regulasi dan kebijakan ATS, dokumen-dokumen inovasi penanganan ATS ataupun lainnya, beserta data terkait pendidikan dasar. Proses pemilihan narasumber utama menggunakan *snowball sampling* terkait untuk membantu mengidentifikasi narasumber yang sesuai dengan kriteria pendokumentasian. Secara umum, narasumber utama terbagi ke dalam kelompok (a) penyedia layanan (*supply side*) yaitu pembuat kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah, dan (b) penerima manfaat (*demand side*) layanan pendidikan yaitu orang tua dari ATS.

Raul Pacheco-Vega dan Kate Parizeau (2018), melalui *Doubly Engaged Ethnography: Opportunities and Challenges When Working with Vulnerable Communities*,¹¹ menjelaskan kembali bahwa etnografi adalah metode kualitatif ampuh yang membantu kita memahami perilaku individu dan komunitas. Baru-baru ini, para etnografer mendapat kritik mengenai etika mempelajari populasi yang terpinggirkan. Makalah kami mengambil pendekatan kritis terhadap penerapan etnografi dalam studi mengenai komunitas dan populasi yang menghadapi kesenjangan besar dan kemiskinan parah. Kami memanfaatkan kritik terbaru mengenai penggunaan etnografi sebagai metodologi penelitian, dan teka-teki etika yang dihadapi para peneliti yang sebagian besar adalah etnografer komunitas rentan.

Melakukan etnografi komunitas dan populasi yang menghadapi kesenjangan besar dan kemiskinan mengharuskan peneliti untuk mampu berpikir keras mengenai isu-isu posisionalitas (apa saja berbagai subjektivitas kita sebagai orang dalam/orang luar, pemegang pengetahuan/pelajar, dan sebagainya ketika berinteraksi dengan subyek yang rentan, dan bagaimana

¹¹ Raul Pacheco-Vega dan Kate Parizeau (2018), *Doubly Engaged Ethnography: Opportunities and Challenges When Working with Vulnerable Communities*, The International Institute for Qualitative Methodology (IIQM) at the University of Alberta. Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1609406918790653>

hal ini mempengaruhi penelitian?), permasalahan keterlibatan versus eksploitasi (bagaimana kita dapat memberikan insentif yang berarti untuk berpartisipasi dalam penelitian kita tanpa bersifat memaksa/ekstraktif, dan dapatkah kita mengharapkan subyek yang rentan untuk terlibat secara mendalam dalam perancangan penelitian/pengumpulan data, dan seterusnya ketika mereka sudah terlalu terbebani?), dan representasi (apa etika dalam merepresentasikan kekerasan, rasisme, dan seksisme seperti yang diungkapkan oleh responden rentan? Bagaimana dengan foto dan cerita yang kita ambil?).



Sumber: <https://coggle-downloads-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/>

Gambar 3.1 Diagram Alur Studi Etnografi

Etnografi dalam ranah kebijakan publik sendiri merupakan pendekatan yang bisa digunakan sebagai jalan untuk mengevaluasi hubungan implikasi kebijakan dengan masyarakat. Disinilah fungsi dari pendekatan etnografi yang melihat melalui perspektif kemasyarakatan. Memberikan perlakuan pada masyarakat sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kebijakan.

Nicolas Fischer (2023) melalui *"Direct Observation and Ethnography-Policy Evaluation"* menerangkan bahwa etnografi kelompok kualitatif, cara observasi sering dikombinasikan dengan wawancara semi-terstruktur, baik dengan agen administratif maupun dengan publik yang mereka temui. Melalui observasi memungkinkan direkonstruksi apa yang tidak bisa dijelaskan dalam wawancara-wawancara, misalnya:

- 1) Observasi memungkinkan kita untuk menghindari sensor diri yang sering diterapkan oleh para informan dalam wawancara, terutama ketika berbicara tentang kualitas pekerjaan dan kinerja misi. Hal ini juga memungkinkan untuk menggambarkan dengan tepat aspek-aspek tertentu dari kebijakan publik yang tidak terpikirkan oleh para evaluator dan yang dievaluasi untuk disebutkan dalam sebuah wawancara. Rutinitas dan kebiasaan setempat, organisasi kerja praktis, postur dan sikap atau komunikasi non-verbal dengan pengguna dan semua hal yang diungkapkan mengenai hubungan sosial dan kesenjangan yang ada dalam hubungan antara pegawai negeri dan masyarakatnya, kemudian dibuat terlihat secara langsung.
- 2) Pendekatan seperti ini akan sangat berguna ketika kebijakan mengevaluasi kelompok sasaran yang sensitif (orang-orang yang rentan atau terpinggirkan secara sosial, penyandang disabilitas, dll.), yang interaksinya memerlukan keterampilan khusus dari pegawai negeri: presentasi diri, kemampuan untuk menjelaskan proses administrasi atau untuk mengelola kegelisahan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pandangan Duranti, etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol dan sumber meterial, serta karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu.¹² Pada dasarnya perhatian utama penelitian etnografi adalah tentang *the way of life* suatu masyarakat. Dalam padangan Spradley etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi juga belajar dari masyarakat.¹³ Karena esensi penelitian etnografi tidak hanya mengambil simpulan dari kebudayaan masyarakat saja, tetapi juga mengambil hikmah dan pelajaran sosial dari kebudayaan tersebut.

Etnografi dianggap sebagai metode khusus yang didalamnya terdapat berbagai bentuk dan karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer (peneliti etnografi) dalam memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada

¹² A. Duranti, *Lingusitic Anthropology*, (California: Cambridge University Press, 1997), hlm. 85

¹³ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 3

kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada. Dalam hal ini, seorang etnografer terlibat langsung dalam kehidupan keseharian sebagai bentuk pengamatan dan pengambilan data di lapangan.

Selain itu, Koentjaraningrat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai etnografi, di mana menurutnya bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah geografi, ekologi, atau wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsi, biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur kebudayaan, sesuai dengan tata urutan yang baku, yang disebut dengan kerangka etnografi. Penjelasan ini cenderung kepada konsep yang melekat pada etnografi melalui pendekatan kerangkanya, di mana pandangan tersebut menitikberatkan pada elemen-elemen kebudayaan yang didasarkan pada tingkatan levelnya sebagai tata urutan yang telah disepakati secara sosial dalam kelompok masyarakat tersebut.¹⁴

Pada dasarnya sifat yang melekat pada penelitian etnografi bersifat holistik-integratif. Hal itu dimaksudkan untuk dapat memberikan penjelasan secara keseluruhan dan saling berkaitan dari objek (budaya) sosial yang dikaji. Budaya telah dianggap sebagai keseluruhan, di mana terdiri dari bagian-bagian yang tidak dapat terpisahkan. Oleh sebab itu, bisa dikatakan interaksi bagian-bagian dari kebudayaan telah menyatu.¹⁵

Selain kerangka etnografi, terdapat pula karakteristik yang melekat pada etnografi. Karakteristik yang dimiliki etnografi di antaranya; pertama, menggali atau meneliti fenomena sosial. Dalam konteks ini, peristiwa yang terjadi didalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam. Kedua, data tidak terstruktur. Sebagai penelitian sosial dengan objek masyarakat tentu data yang bersumber dari masyarakat tidak dapat di ukur kepastiannya, dikarenakan data tersebut sebagai data empiris yang cenderung berbeda dalam persepsi antar personal dan kelompok sosial. Ketiga, kasus atau sampel sedikit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi menggunakan pendekatan induktif, artinya kesimpulan yang didapat didasarkan dari yang khusus menjadi umum. Keempat, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dan tindakan manusia (*human action*).

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm 3-4

¹⁵ Ninip Hanifah, *Penelitian Etnografi dan Penelitian Grounded Theory*, (Jakarta: Akademi Bahasa Asing Borobudur, 2010), hlm. 2

Hal ini yang paling menarik dari etnografi, yakni menarik kesimpulan atas sikap dan perilaku sosial suatu masyarakat.¹⁶

Menurut Creswell (2015, hlm. 936-937), terdapat tiga tipe rancangan etnografi, yaitu etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan etnografi realis. Etnografi realis adalah penjelasan objektif mengenai situasi yang biasanya ditulis dalam pandangan orang ketiga, yang melaporkan secara objektif mengenai informasi yang dipelajari dari partisipan di lapangan. Dalam melakukan penelitian etnografi tidak berlangsung secara linier. Namun, terjadi dalam bentuk siklus penelitian¹⁷. Dalam pandangan Spradley siklus penelitian etnografi mencakup enam langkah, antara lain:¹⁸

- 1) Pemilihan proyek etnografi. Langkah ini menjadi langkah utama untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, desain yang akan digunakan, dan bagaimana tujuan itu dihubungkan dengan masalah penelitian. Hal tersebut akan menentukan proyek penelitian yang akan dilaksanakan, di mana merupakan desain etnografi realis, studi kasus, ataupun kritis.
- 2) Pengajuan pertanyaan. Terdapat tiga unsur penting dalam mengajukan pertanyaan (wawancara), yakni tujuan yang eksplisit, penjelasan, dan pertanyaan yang bersifat etnografis. Pada dasarnya aktivitas wawancara ini sudah dilakukan sejak melakukan observasi. Terdapat tiga pertanyaan penting dalam observasi, yakni; siapa yang ada di latar penelitian?, apa yang mereka lakukan?, dan apa latar fisik situasi sosial tersebut? Selanjutnya, peneliti berhak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang menjadi fokus penelitian.
- 3) Pengumpulan data. Tugas penting dalam penelitian etnografi adalah melakukan pengumpulan dan pencarian data. Pada dasarnya pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yang beragam (*multiple procedures*), serta intensitasnya bervariasi sesuai dengan tipe (bentuk) penelitian etnografi yang dilaksanakan. Misalnya, dalam penelitian etnografi realis, peneliti akan tinggal bersama dengan para partisipan

¹⁶ P. Atkinson dan M. Hammersley, "Etnography and Participant Observation", *Handbook of Qualitative Research*. (Thousand Oaks: Sage, 1994), 249-261, hlm. 250

¹⁷ Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

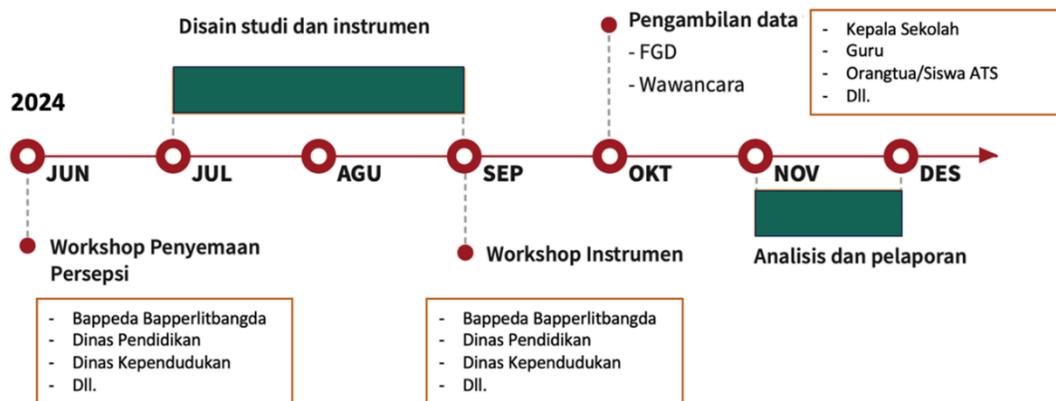
¹⁸ James P. Spradley, *Participant Observation*, (New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980), hlm 22-35

dalam waktu yang relatif lama, dimana data akan didapat melalui wawancara, pengamatan langsung atas perilaku, serta pengamatan terhadap artefak dan simbol-simbol budaya. Selanjutnya, dalam penelitian etnografi kritis, pengumpulan data akan lebih fokus kepada kolaborasi antara peneliti dengan partisipan dengan mengagendakan meningkatkan pemahaman tentang situasi tertentu untuk dapat diambil langkah yang tepat.

- 4) Perekaman data. Berbagai data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara kemudian dilakukan perekaman atas data tersebut, di mana disesuaikan dengan jenis dan bentuknya. Perekaman data dapat dilakukan dengan bentuk catatan lapangan, foto, video, serta cara lainnya yang dapat membantu peneliti dalam menganalisisnya.
- 5) Analisis data. Dalam melakukan analisis data dilakukan secara simultan. Tahapan dalam analisis data melalui empat bentuk, yakni; analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau pengertian menyeluruh tentang objek penelitian (situasi sosial); analisis taksanomi digunakan untuk menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya; analisis komponensial digunakan untuk melakukan wawancara atau pengamatan terpilih agar memperdalam data melalui pengajuan pertanyaan yang kontras antar elemen dalam suatu domain; dan analisis tema kultural yang digunakan untuk melakukan pencarian kesimpulan antara domain untuk memperoleh tema-tema tertentu, seperti nilai-nilai, premis, etos, pandangan dunia, ataupun orientasi kognitif.
- 6) Penulisan laporan. Kegiatan ini menjadi langkah akhir dalam penelitian etnografi. Pada dasarnya penelitian etnografi melibatkan suatu *open-ended enquiry*, di mana mungkin saja peneliti diharuskan mengadakan analisis yang lebih intensif jika pada saat menulis laporan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan observasi lanjutan. Sedangkan, diskusi pada bagian akhir mengindikasikan adanya sistemisasi pengetahuan tentang kebudayaan yang telah diteliti.

B. WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan selama 6 bulan (Juni-Desember 2024) dimulai dari proses penyiapan proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisisioner, dan melakukan uji validitas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan, setelah itu baru menganalisa data dan penulisan laporan.



Gambar 3.2 Jadwal Penelitian

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah menemukan penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendekatan antropologi ataupun etnografi. Selain itu penelitian ini diupayakan untuk mengetahui metode penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tepat sasaran sesuai dengan penyebab dan kebutuhannya.

Untuk lebih detail dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

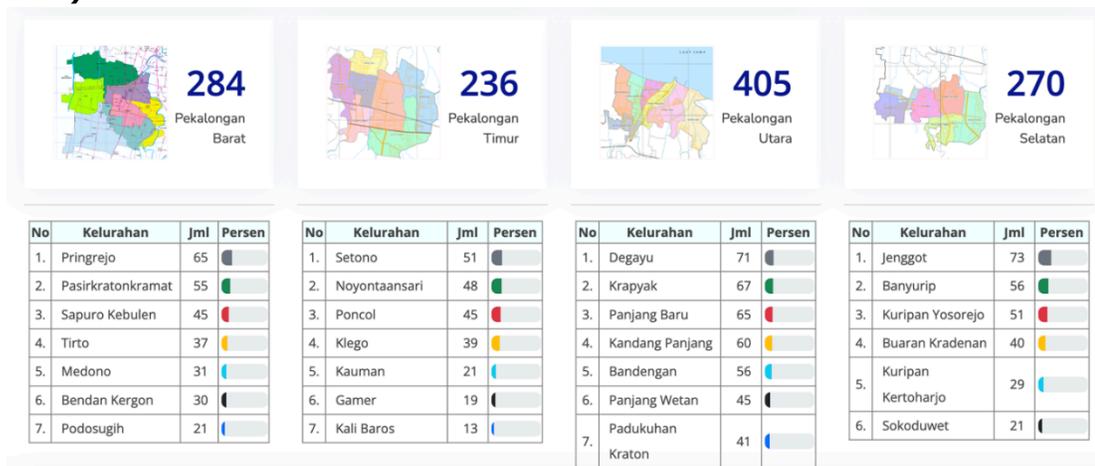
Objek	Pelaksana Kebijakan	Pelaksana Pembelajaran
Penyedia Layanan (<i>Supply Side</i>) dan Penerima Manfaat (<i>Demand Side</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bapperlitbangda - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - SKB - PKBM - Pondok Pesantren

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) BERDASAR KEWILAYAHAN DI KOTA PEKALONGAN

Analisis penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan berdasarkan aspek kewilayahan, seperti yang ditunjukkan melalui Tabel 5.1, adanya variasi karakteristik dan tantangan khusus di masing-masing kecamatan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Setiap kecamatan di Kota Pekalongan memiliki faktor penyebab ATS yang unik, dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, budaya, aksesibilitas, serta dukungan keluarga terhadap pendidikan.

Tabel 4.1 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Kewilayahan (Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan 2024)



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Berdasarkan data dari Kota Pekalongan, analisis penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat dilihat dari aspek kewilayahan yang dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Setiap kecamatan menunjukkan jumlah dan karakteristik penyebab ATS yang berbeda di setiap kelurahannya.

Berikut adalah analisis lebih rinci mengenai masing-masing kecamatan dan kelurahan yang terdapat dalam data ini, di antaranya:

1. Kecamatan Pekalongan Barat

Kecamatan Pekalongan Barat merupakan wilayah dengan beragam latar belakang ekonomi dan sosial, namun terdapat banyak keluarga berpenghasilan rendah yang masih mengandalkan pekerjaan informal. Kondisi ini membuat anak-anak di wilayah ini rentan untuk keluar dari sistem pendidikan formal dan bekerja membantu ekonomi keluarga. Di Kecamatan Pekalongan Barat terdapat 284 ATS, ditunjukkan Kelurahan dengan ATS Tertinggi berada di Kelurahan Pringrejo (65 anak), Pasirkratonkramat (55 anak), Sapuro Kebulen (45 anak). Selain faktor ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja, kurangnya motivasi dari keluarga dan pola pikir yang kurang mengutamakan pendidikan juga berperan besar. Di beberapa kasus, anak-anak tidak melihat relevansi antara pendidikan formal dan perbaikan kesejahteraan keluarga mereka.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius di beberapa kelurahan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi rendah, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, serta akses ke fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Di wilayah ini, masalah ekonomi memainkan peran besar. Banyak keluarga yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan informal atau industri kerajinan, sehingga anak-anak sering kali dilibatkan dalam pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, beberapa kelurahan di Pekalongan Barat mungkin masih menghadapi kendala aksesibilitas dan fasilitas sekolah yang belum optimal, membuat anak-anak enggan bersekolah.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

a) Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah daerah perlu meluncurkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, terutama di kelurahan dengan tingkat ATS tinggi seperti Medono dan Pringrejo. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau bantuan ekonomi langsung.

b) Pendidikan Kesadaran Keluarga

Program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan juga dibutuhkan. Melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan dalam kegiatan penyuluhan dapat membantu mengubah pandangan orang tua yang lebih mengutamakan anak bekerja daripada bersekolah.

c) Pengembangan Infrastruktur Sekolah

Pembangunan atau peningkatan fasilitas sekolah di beberapa kelurahan dapat membantu menarik minat anak untuk kembali bersekolah. Fasilitas yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

2. Kecamatan Pekalongan Timur

Kecamatan Pekalongan Timur mencatat 236 anak yang tidak bersekolah. Kelurahan dengan ATS Tertinggi: Setono (51 anak), Noyontaansari (48 anak), Poncol (45 anak), Klego (39 anak), Kauman (21 anak), Gamer (19 anak), Kali Baros (13 anak). Pekalongan Timur memiliki karakteristik yang berbeda dari Pekalongan Barat, dengan beberapa daerah yang relatif lebih maju secara ekonomi namun tetap menghadapi tantangan dalam aspek sosial dan motivasi anak. Di wilayah ini, pergaulan dan kurangnya motivasi untuk bersekolah tampaknya menjadi penyebab utama ATS. Lingkungan yang memungkinkan anak-anak lebih memilih kegiatan selain sekolah, ditambah pengaruh teman sebaya yang kurang mendukung pendidikan, membuat anak-anak di wilayah ini mudah kehilangan minat untuk belajar. Di beberapa kelurahan seperti Poncol dan Klego, anak-anak mungkin merasa bahwa mereka dapat bekerja lebih awal tanpa perlu menyelesaikan pendidikan.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

a) Program Bimbingan dan Konseling Sekolah

Setiap sekolah di Pekalongan Timur perlu memiliki program bimbingan dan konseling yang kuat untuk membantu anak-anak mengatasi masalah motivasi dan pergaulan negatif. Konselor dapat

bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan dukungan khusus bagi siswa yang berisiko putus sekolah.

b) Kegiatan Ekstrakurikuler dan Bimbingan Karir

Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan program bimbingan karir dapat membantu anak-anak memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Ini bisa berupa kunjungan ke industri, lokakarya keterampilan, atau pengenalan profesi yang membuat anak-anak melihat pentingnya pendidikan dalam meraih kesuksesan.

c) Keterlibatan Komunitas dan Program Pemuda

Melibatkan komunitas dan organisasi pemuda dalam kegiatan positif akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Pembentukan klub belajar atau kelompok pemuda yang menekankan pentingnya pendidikan dapat membantu mengatasi pergaulan negatif di kalangan anak-anak.

3. Kecamatan Pekalongan Utara

Kecamatan Pekalongan Utara memiliki 405 anak yang tidak bersekolah dan yang tertinggi di Kota Pekalongan. Kelurahan dengan ATS Tertinggi: Degayu (71 anak), Krapyak (67 anak), Panjang Baru (65 anak), Kandang Panjang (60 anak), Bandengan (56 anak), Panjang Wetan (45 anak), Padukuhan Kraton (41 anak). Wilayah ini adalah wilayah pesisir yang banyak penduduknya bekerja di sektor perikanan dan pekerjaan informal lainnya. Banyak keluarga di wilayah ini yang memiliki pendapatan rendah, sehingga anak-anak sering kali terpaksa bekerja. Di Pekalongan Utara, faktor ekonomi dan akses ke sekolah yang cukup jauh menjadi tantangan utama. Banyak keluarga di wilayah pesisir yang lebih mengutamakan anak-anak mereka untuk bekerja daripada bersekolah. Selain itu, jarak sekolah yang cukup jauh untuk anak-anak yang tinggal di daerah pesisir ini bisa mengurangi minat mereka untuk terus bersekolah.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

a) Subsidi Transportasi atau Fasilitas Transportasi Sekolah

Program subsidi transportasi atau penyediaan bus sekolah di daerah-daerah dengan akses terbatas akan membantu mengatasi kendala jarak. Program ini bisa dirancang untuk anak-anak di kelurahan seperti Panjang Wetan dan Krapyak.

b) Program Pengembangan Ekonomi untuk Keluarga Nelayan

Pelatihan dan program pengembangan ekonomi untuk keluarga nelayan atau yang bergantung pada pekerjaan informal dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga anak-anak tidak perlu bekerja dan dapat tetap bersekolah.

c) Edukasi Pentingnya Pendidikan melalui Organisasi Lokal

Program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat, seperti nelayan senior atau ketua RT/RW, dapat membantu meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Kampanye yang menyasar orang tua di wilayah pesisir bisa membantu mengubah persepsi tentang pendidikan.

4. Kecamatan Pekalongan Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan mencatat 270 anak ATS, dengan jumlah tertinggi berada di Jenggot (73 anak), Banyurip (56 anak), Kuripan Yosorejo (51 anak), Buaran Kradenan (40 anak), Kuripan Kertoharjo (29 anak), Sokoduwet (21 anak). Kecamatan ini memiliki karakteristik masyarakat dengan latar belakang yang lebih beragam, serta beberapa daerah dengan akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan kecamatan lain. Di wilayah ini, masalah sosial dan budaya, seperti pola pikir orang tua yang cenderung tidak memprioritaskan pendidikan, menjadi penyebab utama ATS. Beberapa keluarga mungkin merasa bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk masa depan anak-anak mereka atau kurang memiliki pemahaman akan manfaat pendidikan jangka panjang.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

a) Program Penyuluhan Berbasis Keluarga dan Komunitas

Penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan sangat diperlukan. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dapat membantu mengubah pola pikir keluarga yang kurang mendukung pendidikan.

b) Program Pengembangan Kapasitas untuk Anak-Anak

Melalui program pengembangan kapasitas seperti pelatihan keterampilan, anak-anak di Pekalongan Selatan dapat mendapatkan keterampilan tambahan tanpa meninggalkan pendidikan formal. Program ini juga dapat disinergikan dengan dunia industri lokal untuk memberikan kesempatan magang kepada siswa.

c) Pengembangan Fasilitas Sekolah dan Program Pendidikan Alternatif

Untuk menarik minat anak-anak, fasilitas sekolah perlu ditingkatkan. Program pendidikan alternatif seperti kelas sore atau kejar paket untuk anak-anak yang terpaksa bekerja juga bisa menjadi solusi agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan.

5. **Priotiras di Kelurahan**

Pada tingkat kelurahan, berikut adalah usulan sasaran intervensi prioritas pertama kepada kelurahan-kelurahan di Kota Pekalongan yang memiliki jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi. Intervensi ini dirancang untuk menangani penyebab utama ATS yang spesifik pada masing-masing kelurahan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dengan intervensi yang terfokus, diharapkan penurunan angka ATS di kelurahan-kelurahan prioritas ini dapat dicapai secara efektif.

Berikut ini adalah usulan sasaran intervensi ATS prioritas 1 kepada beberapa kelurahan dan bentuk intervensi yang disarankan:

1) Kelurahan Pringrejo (Kecamatan Pekalongan Barat)

a) Jumlah ATS sebanyak 65 anak

b) Karakteristik Permasalahan

Kelurahan Pringrejo menunjukkan angka ATS yang tinggi, kemungkinan besar disebabkan oleh faktor ekonomi yang memaksa anak untuk bekerja, serta kurangnya motivasi belajar akibat lingkungan dan kurangnya dukungan keluarga.

c) Usulan Intervensi

▪ Program Bantuan Ekonomi Keluarga

Meluncurkan program bantuan ekonomi khusus untuk keluarga berpenghasilan rendah di Medono. Program ini dapat berupa bantuan modal usaha bagi orang tua untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga anak-anak tidak perlu bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.

▪ Penyuluhan Pentingnya Pendidikan bagi Orang Tua

Mengadakan program penyuluhan bagi orang tua di Medono untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Program ini dapat melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan pengaruhnya.

▪ Program Pemberdayaan Pemuda

Membentuk kelompok pemuda yang dapat memotivasi dan mendampingi anak-anak agar tetap bersekolah. Kelompok ini bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan menyediakan kegiatan positif di luar jam sekolah.

2) Kelurahan Setono (Kecamatan Pekalongan Timur)

a) Jumlah ATS sebanyak 51 anak.

b) Karakteristik Permasalahan

Kelurahan Setono memiliki tantangan dalam hal pengaruh pergaulan dan rendahnya motivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Faktor ini mungkin diperparah oleh lingkungan yang memungkinkan anak-anak untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang tidak mendukung pendidikan.

c) Usulan Intervensi

▪ Bimbingan Konseling Terpadu di Sekolah dan Masyarakat

Menyediakan program konseling yang bekerja sama antara sekolah, komunitas, dan orang tua untuk memberikan dukungan psikologis dan motivasi kepada anak-anak yang berisiko tinggi menjadi ATS.

- Kegiatan Ekstrakurikuler dan Bimbingan Karir

Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang menarik bagi anak-anak, seperti keterampilan praktis yang relevan dengan industri lokal atau bimbingan karir untuk menunjukkan potensi karir melalui pendidikan.

- Pendampingan oleh Mentor dari Komunitas Lokal

Mengidentifikasi tokoh pemuda sukses di Poncol yang bisa menjadi mentor bagi anak-anak, memberikan motivasi dan inspirasi untuk melanjutkan pendidikan. Mentor ini bisa memberikan pengaruh positif dan memperlihatkan pentingnya pendidikan.

3) Kelurahan Degayu (Kecamatan Pekalongan Utara)

a) Jumlah ATS sebanyak 71 anak.

b) Karakteristik Permasalahan

Wilayah ini dekat dengan area pesisir dan banyak keluarga bekerja di sektor informal, sehingga anak-anak cenderung lebih terdorong untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Jarak sekolah juga menjadi kendala bagi beberapa anak di wilayah ini.

c) Usulan Intervensi

- Subsidi Transportasi atau Penyediaan Bus Sekolah

Memberikan subsidi transportasi atau menyediakan layanan bus sekolah bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah, untuk mengatasi kendala aksesibilitas.

- Program Pemberdayaan Keluarga Nelayan

Mengembangkan program yang memberikan pelatihan keterampilan kepada keluarga nelayan agar memiliki peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga anak-anak dapat tetap fokus pada pendidikan.

- Sosialisasi tentang Pentingnya Pendidikan Melalui Kelompok

Masyarakat

Menyediakan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat, seperti ketua RT/RW dan pemimpin komunitas nelayan, untuk mendorong pentingnya pendidikan bagi anak-anak di daerah pesisir ini.

4) Kelurahan Jenggot (Kecamatan Pekalongan Selatan)

a) Jumlah ATS sebanyak 73 anak.

b) Karakteristik Permasalahan

Di wilayah ini, tantangan utama adalah pola pikir keluarga yang cenderung tidak memprioritaskan pendidikan. Banyak orang tua yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

c) Usulan Intervensi

- Penyuluhan tentang Manfaat Pendidikan bagi Orang Tua

Menyediakan program penyuluhan yang melibatkan orang tua, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat pendidikan jangka panjang. Penyuluhan ini dapat dilakukan dengan bantuan tokoh agama atau komunitas yang disegani.

- Program Keterlibatan Orang Tua di Sekolah

Membuat program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan bulanan atau kegiatan bersama antara orang tua dan anak di sekolah, untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pendidikan.

- Pelatihan Keterampilan untuk Anak dan Orang Tua

Menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang relevan untuk orang tua dan pelatihan tambahan bagi anak-anak, sehingga mereka melihat nilai tambah dari melanjutkan pendidikan dan memiliki keterampilan untuk masa depan.

Intervensi prioritas untuk kelurahan-kelurahan di Kota Pekalongan yang memiliki tingkat ATS tinggi perlu difokuskan pada aspek ekonomi, dukungan keluarga, dan aksesibilitas pendidikan. Setiap kelurahan memiliki karakteristik

dan tantangan yang unik, sehingga intervensi harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan menerapkan intervensi yang fokus pada masing-masing kelurahan prioritas ini, diharapkan angka ATS di Kota Pekalongan dapat berkurang secara signifikan, serta anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan merata. Hal ini akan membantu mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Kota Pekalongan, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pendidikan untuk semua.

Adapun pendekatan kebijakan yang bisa dilakukan antara lain:

a) Pendekatan Kolaboratif

Pemerintah Kota Pekalongan perlu bekerja sama dengan komunitas, tokoh masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menjalankan program intervensi yang efektif. Kolaborasi ini akan memastikan program dapat dijalankan dengan pendekatan budaya yang sesuai dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

b) Pemberdayaan Ekonomi dan Edukasi Keluarga

Peningkatan ekonomi keluarga di kelurahan dengan ATS tinggi sangat penting agar anak-anak tidak perlu bekerja dan bisa melanjutkan pendidikan. Edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi keluarga yang cenderung memprioritaskan ekonomi jangka pendek juga akan membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan.

c) Penyediaan Akses yang Lebih Baik ke Sekolah

Untuk kelurahan yang memiliki kendala akses, penyediaan transportasi sekolah atau subsidi biaya transportasi perlu dipertimbangkan. Selain itu, pengembangan fasilitas pendidikan di daerah sub urban akan membantu anak-anak memiliki akses yang lebih mudah ke sekolah.

d) Konseling dan Program Motivasi bagi Anak-anak

Program bimbingan konseling yang menyeluruh dapat membantu anak-anak yang kehilangan motivasi untuk bersekolah. Pendekatan melalui tokoh pemuda yang sukses, mentor, dan bimbingan karir akan

menjadi cara efektif untuk memotivasi anak-anak tetap berada di bangku sekolah.

B. BEBERAPA ASPEK-ASPEK PENTING PENYEBAB ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KOTA PEKALONGAN

Kondisi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor kewilayahan dan aspek-aspek sosio-ekonomi yang berbeda di tiap kecamatan. Kota Pekalongan sendiri terbagi ke dalam beberapa wilayah administratif dengan karakteristik dan tantangan tersendiri terkait pendidikan anak-anak usia sekolah. Berdasarkan kajian awal, terdapat disparitas tingkat ATS di antara wilayah-wilayah tersebut, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut tergambarkan pada beberapa tabel dibawah ini, dimulai dari Tabel 4.2 penyebab ATS berdasar aspek ekonomi, kemudian Tabel 4.3 penyebab ATS berdasar aspek budaya, Tabel 4.4 penyebab ATS berdasar aspek sosial, serta Tabel 4.5 penyebab ATS berdasar aspek layanan/fasilitas/sarana dan prasarana.

1. Aspek Ekonomi

Pada Tabel 4.2, penyebab terbesar ATS di Kota Pekalongan disebabkan oleh dorongan untuk harus bekerja dengan angka 37.85% bagi laki-laki dan 31.31% bagi perempuan. Hal ini bisa diartikan bahwa, di Kota Pekalongan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan, terutama disebabkan oleh keharusan mereka untuk bekerja demi membantu pendapatan keluarga. Fenomena ini umum terjadi di kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, di mana anak-anak sering kali dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja keluarga. Sebagai kota dengan sektor industri dan kerajinan yang berkembang, seperti batik dan kerajinan tekstil, Kota Pekalongan menciptakan peluang kerja informal yang mudah diakses oleh anak-anak, sehingga banyak dari mereka akhirnya terjun ke dunia kerja sejak dini.

Tabel 4.2 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Ekonomi (Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan 2024)



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan karena keharusan bekerja adalah masalah yang kompleks dan terkait erat dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di Kota Pekalongan, upaya untuk mengatasi ATS perlu dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup intervensi ekonomi, pendidikan nonformal, dan kesadaran masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas, diharapkan anak-anak di Kota Pekalongan dapat kembali menikmati hak pendidikan mereka, membangun masa depan yang lebih baik, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut ini adalah beberapa aspek penyebab anak tidak sekolah karena harus bekerja, beserta analisis mendalam mengenai kondisi yang ada:

1) Faktor Ekonomi dan Ketergantungan Keluarga terhadap Penghasilan Tambahan

Ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghasilan tambahan dari anak membuat pendidikan anak menjadi kurang prioritas. Meskipun pendidikan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, tekanan ekonomi sering kali mendorong keluarga untuk mengambil jalan pintas dengan mempekerjakan anak-anak, yang pada akhirnya mengorbankan masa depan mereka dalam jangka panjang. Banyak keluarga di Kota Pekalongan yang memiliki penghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau sebagai buruh harian. Dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, anak-anak sering kali dilibatkan dalam aktivitas ekonomi

untuk menambah pendapatan keluarga. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, terutama dalam hal pangan, kesehatan, dan tempat tinggal, orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung melihat pendidikan sebagai kebutuhan sekunder. Anak-anak pun terpaksa bekerja, baik di rumah tangga maupun di sektor industri, untuk membantu meringankan beban keluarga.

2) Peluang Kerja di Sektor Industri dan Kerajinan Lokal

Keberadaan industri lokal yang memiliki keterkaitan budaya, seperti batik, memperkuat alasan bagi orang tua untuk mengikutsertakan anak dalam pekerjaan tersebut. Keterlibatan anak dalam pekerjaan ini juga dianggap sebagai warisan keterampilan keluarga. Namun, hal ini justru memutus akses anak-anak terhadap pendidikan formal yang lebih diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik, dengan banyaknya industri kecil hingga menengah yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Anak-anak sering kali dipekerjakan di industri ini karena pekerjaan batik dianggap ringan dan bisa dilakukan dengan cepat setelah anak belajar teknik dasarnya. Orang tua melihat pekerjaan ini sebagai alternatif yang lebih produktif daripada pendidikan. Selain batik, sektor tekstil dan kerajinan lain juga menyerap tenaga kerja anak-anak karena pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah dan tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Banyak anak yang membantu dalam proses pengerjaan kain, pengemasan, dan penjualan produk, yang menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi keluarga.

3) Pandangan Sosial dan Budaya yang Mendukung Anak Bekerja

Pandangan sosial yang mendukung anak bekerja menunjukkan adanya nilai budaya yang mengutamakan kontribusi anak dalam pendapatan keluarga. Pemahaman yang terbatas terhadap nilai pendidikan mengakibatkan orang tua lebih memilih keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan potensi peningkatan kesejahteraan jangka panjang melalui pendidikan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kesadaran pendidikan di kalangan masyarakat ekonomi rendah.

Dalam budaya tertentu, anak-anak dianggap sebagai aset ekonomi yang harus turut berkontribusi pada penghasilan keluarga. Orang tua dengan kondisi ekonomi yang sulit sering kali memandang keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Anak-anak yang tidak bekerja malah dianggap kurang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Di kalangan masyarakat yang kurang berpendidikan, pentingnya pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak sering kali kurang dipahami. Sebaliknya, orang tua lebih fokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek, sehingga anak-anak diikutsertakan dalam pekerjaan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

4) Tekanan Ekonomi Akibat Dampak Pandemi

Tekanan ekonomi akibat pandemi menyebabkan anak-anak yang sudah bekerja semakin sulit untuk kembali ke pendidikan formal. Selain itu, kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghasilan anak, yang dapat berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak-anak di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang efektif untuk membantu keluarga yang terkena dampak agar anak-anak dapat kembali ke sekolah.

Pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi ekonomi banyak keluarga di Kota Pekalongan, terutama di kalangan pekerja informal. Banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan. Untuk bertahan hidup, anak-anak pun terpaksa bekerja, mengisi kekosongan yang ditinggalkan akibat penurunan ekonomi keluarga. Akibat pandemi, banyak anak yang sudah terbiasa bekerja dan menghasilkan uang sendiri, sehingga kehilangan minat untuk kembali ke sekolah. Kecenderungan ini menjadi ancaman serius bagi upaya penuntasan pendidikan dasar bagi semua anak.

Adapun Rekomendasi Kebijakan untuk Penanganan ATS karena Keharusan Bekerja, diantaranya:

1) Program Bantuan Ekonomi untuk Keluarga Rentan

Program bantuan ekonomi yang ditargetkan kepada keluarga dengan anak berisiko putus sekolah dapat membantu mengurangi

ketergantungan ekonomi pada anak. Bantuan ini dapat berupa dukungan modal usaha atau program pengembangan ekonomi yang memungkinkan orang tua mendapatkan penghasilan tambahan.

2) Penyediaan Pendidikan Nonformal yang Fleksibel

Program pendidikan nonformal, seperti kejar paket atau sekolah malam, dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang sudah bekerja tetapi ingin tetap mendapatkan pendidikan. Dengan fleksibilitas waktu dan lokasi, pendidikan nonformal dapat lebih mudah diakses oleh anak-anak yang bekerja.

3) Penyuluhan tentang Pentingnya Pendidikan

Program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Pendekatan budaya yang menekankan manfaat pendidikan untuk masa depan anak akan menjadi langkah efektif dalam mendorong kesadaran.

4) Perbaikan Akses Pendidikan dan Dukungan Biaya

Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah dengan akses terbatas, dan memastikan bantuan biaya sekolah mencakup kebutuhan pendidikan yang lebih komprehensif. Hal ini akan membantu mengurangi kendala ekonomi bagi keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak.

2. Aspek Budaya

Pada Tabel 4.3 menggambarkan bahwa kondisi anak tidak sekolah (ATS) di Kota Pekalongan menghadapi permasalahan yang cukup kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya dan sosial ekonomi. Sebagai kota yang dikenal dengan industrinya, khususnya batik dan kerajinan, Kota Pekalongan menawarkan sejumlah peluang kerja bagi masyarakat setempat, termasuk bagi anak-anak. Di balik peluang ini, ada tantangan yang membuat anak-anak di Kota Pekalongan terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan memilih untuk bekerja. Berdasarkan analisis aspek budaya yang dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi alasan anak-anak di Kota Pekalongan tidak bersekolah, seperti kurangnya motivasi, keinginan untuk bebas, pola pikir orang tua, serta faktor-faktor lainnya.

Tabel 4.3 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Budaya (Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan 2024)



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Analisis ini menunjukkan bahwa faktor budaya, ekonomi, dan pola pikir yang ada di Kota Pekalongan memiliki pengaruh signifikan terhadap masalah anak tidak sekolah. Lingkungan yang memberi peluang kerja pada usia muda, pola pikir pragmatis orang tua, serta kurangnya motivasi dari anak-anak menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berbasis budaya untuk menangani masalah ATS di Kota Pekalongan. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor industri, Kota Pekalongan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan generasi mendatang.

Adapun gambaran umumnya sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Motivasi sebagai Faktor Utama di Lingkungan Kota Pekalongan

Kurangnya motivasi menjadi faktor dominan di antara anak-anak yang tidak bersekolah di Kota Pekalongan, baik laki-laki maupun perempuan. Pada anak laki-laki, sebanyak 135 anak (55,56%) menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan, sementara pada anak perempuan, ada 48 anak (52,75%) yang juga mengalami kendala motivasi. Lingkungan di Kota Pekalongan yang kental dengan budaya kerja di industri kerajinan, terutama industri batik, bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya motivasi ini. Anak-anak mungkin melihat bahwa bekerja di industri tersebut memberikan penghasilan langsung yang mereka anggap lebih bermanfaat daripada mengikuti pendidikan formal. Minimnya peran

model inspiratif yang menunjukkan manfaat pendidikan jangka panjang juga menjadi tantangan di masyarakat Kota Pekalongan, di mana anak-anak tidak banyak mendapatkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan dari lingkungan sekitarnya.

2) Keinginan untuk Bebas dan Implikasinya dalam Konteks Sosial Pekalongan

Keinginan anak-anak untuk bebas menjadi faktor signifikan kedua yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah. Sebanyak 84 anak laki-laki (34,57%) dan 27 anak perempuan (29,67%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih kebebasan daripada terikat dengan aturan dan rutinitas sekolah. Di Kota Pekalongan, hal ini sering kali terkait dengan budaya lokal di mana anak-anak, terutama remaja, mulai bekerja di usia dini untuk mencari pengalaman atau mendukung ekonomi keluarga. Mereka merasa bahwa bekerja memberikan mereka otonomi dan kedewasaan yang dihargai dalam masyarakat sekitar. Keinginan untuk bebas ini mungkin juga dipicu oleh kurangnya fasilitas atau kegiatan yang menarik di sekolah, sehingga anak-anak merasa kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Dalam lingkungan yang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bekerja sejak usia dini, kebebasan ini justru dianggap sebagai bagian dari perkembangan sosial mereka, meskipun mengorbankan pendidikan formal.

3) Pengaruh Pola Pikir Orang Tua di Masyarakat Pekalongan

Pola pikir orang tua di Kota Pekalongan memainkan peran penting dalam keputusan anak untuk berhenti sekolah. Sebanyak 21 anak laki-laki (8,64%) dan 15 anak perempuan (16,48%) menunjukkan bahwa pola pikir orang tua yang kurang mendukung pendidikan menjadi salah satu alasan utama mereka tidak bersekolah. Dalam beberapa keluarga di Kota Pekalongan, pendidikan formal masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak esensial, terutama jika orang tua sendiri tidak memiliki pengalaman pendidikan yang tinggi. Bagi sebagian orang tua, keterampilan praktis seperti bekerja di industri batik atau kerajinan tekstil dianggap lebih relevan dan memberikan manfaat ekonomi langsung. Ketidakmampuan ekonomi dan pandangan pragmatis terhadap pendidikan membuat orang tua lebih mendorong anak-anak mereka untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan formal,

terutama jika pendidikan tersebut dianggap mahal atau tidak memberikan hasil nyata dalam waktu singkat.

4) Tidak Ada Masalah Signifikan pada Sebagian Kecil Anak

Meski jumlahnya kecil, terdapat beberapa anak di Kota Pekalongan yang tidak menghadapi kendala atau masalah tertentu yang menghalangi mereka untuk bersekolah. Pada kelompok ini, hanya 1,23% anak laki-laki dan 1,10% anak perempuan yang menyatakan bahwa mereka tidak bersekolah bukan karena adanya hambatan, tetapi lebih karena keputusan pribadi atau pengaruh lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kecil anak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena mereka merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang dimiliki atau karena telah mendapatkan pekerjaan yang dirasa mencukupi. Ini juga bisa menunjukkan adanya anak-anak yang merasa kurang termotivasi karena tidak melihat kebutuhan pendidikan formal dalam kehidupan sehari-hari di Kota Pekalongan.

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ATS di Kota Pekalongan, khususnya dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sosial ekonomi setempat, antara lain:

1) Penguatan Program Pendidikan Alternatif yang Fleksibel

Pemerintah Kota Pekalongan dapat mengembangkan program pendidikan alternatif seperti sekolah kejar paket, kelas malam, atau program pendidikan vokasi yang relevan dengan industri lokal. Misalnya, mengintegrasikan program pembelajaran yang mengajarkan keterampilan industri batik atau kerajinan sambil tetap memberikan pendidikan formal. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat tetap belajar tanpa harus melepaskan keterlibatan mereka dalam industri yang menghidupi banyak keluarga di Kota Pekalongan.

2) Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan

Program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu mengubah pola pikir orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Edukasi bagi orang tua tentang

manfaat pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak mereka dapat mendorong perubahan perspektif, terutama bagi keluarga yang terbiasa melihat pendidikan sebagai hal yang kurang penting.

3) Pemberian Bantuan Ekonomi untuk Keluarga dengan Anak Rentan Putus Sekolah

Untuk mengurangi ketergantungan keluarga pada penghasilan tambahan dari anak-anak, Pemerintah Kota Pekalongan bisa memberikan bantuan ekonomi yang terarah bagi keluarga berpenghasilan rendah. Bantuan ini dapat berupa beasiswa, program bantuan pangan, atau modal usaha untuk keluarga, sehingga orang tua tidak merasa terpaksa melibatkan anak dalam pekerjaan demi menambah pendapatan keluarga.

4) Pengembangan Program Bimbingan Karir dan Motivasi bagi Anak-Anak di Sekolah

Program bimbingan karir yang menunjukkan peluang dan manfaat pendidikan tinggi dapat membantu meningkatkan motivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Dengan menghadirkan pembicara tamu yang berhasil dalam berbagai bidang dan memberikan paparan tentang pentingnya pendidikan, anak-anak dapat memperoleh inspirasi dan motivasi baru untuk mengejar pendidikan.

5) Kolaborasi dengan Industri Lokal untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan

Pemerintah Kota Pekalongan bisa bekerja sama dengan industri-industri lokal, seperti industri batik dan tekstil, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan pekerja. Dengan adanya komitmen dari pihak industri untuk memprioritaskan pekerja yang memiliki pendidikan formal, keluarga-keluarga di Kota Pekalongan mungkin akan lebih termotivasi untuk mendukung anak-anak mereka bersekolah.

3. Aspek Sosial

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 4.4, penyebab anak tidak sekolah dari aspek sosial di Kota Pekalongan diidentifikasi melalui beberapa faktor utama, yaitu pengaruh pergaulan, kondisi disabilitas, rasa malu atau enggan, kurangnya perhatian dan dukungan keluarga, serta faktor-faktor

tambahan lainnya seperti pengalaman traumatik dan perundungan. Data ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yakni anak laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan perbedaan dalam faktor-faktor yang memengaruhi mereka untuk tidak bersekolah.

Tabel 4.4 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Sosial (Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindikcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan 2024)

Analisis Penyebab ANAK Tidak Sekolah Aspek Sosial		Laki-laki					Perempuan				
No	Aspek Sosial	Jumlah	Persen	Lihat		No	Aspek Sosial	Jumlah	Persen	Lihat	
1.	Pergaulan	106	33.02%	Lihat		1.	Difabel	43	28.29%	Lihat	
2.	Difabel	67	20.87%	Lihat		2.	Malu / Enggan	34	22.37%	Lihat	
3.	Malu / Enggan	61	19.00%	Lihat		3.	Pergaulan	26	17.11%	Lihat	
4.	Kurang Perhatian / Dukungan Keluarga	49	15.26%	Lihat		4.	Kurang Perhatian / Dukungan Keluarga	18	11.84%	Lihat	
5.	Traumatik	15	4.67%	Lihat		5.	Menikah	12	7.89%	Lihat	
6.	Perundungan/ Bullying	13	4.05%	Lihat		6.	Perundungan/ Bullying	8	5.26%	Lihat	

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Kondisi anak tidak sekolah di Kota Pekalongan akibat faktor sosial menunjukkan kompleksitas yang memerlukan intervensi dari berbagai pihak. Faktor pergaulan, disabilitas, rasa malu, kurangnya perhatian keluarga, pengalaman traumatik, dan pernikahan dini merupakan tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk terus bersekolah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas, Kota Pekalongan dapat mengurangi angka ATS dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Berikut adalah analisis lebih rinci mengenai faktor-faktor sosial tersebut di Kota Pekalongan, diantaranya:

1) Pengaruh Pergaulan sebagai Faktor Utama bagi Anak Laki-Laki

Pada anak laki-laki di Kota Pekalongan, pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah, dengan 106 anak (33,02%) menyebutkan pengaruh teman sebaya sebagai alasan utama. Kota Pekalongan, yang memiliki lingkungan industri dan

budaya kerja informal, mungkin menciptakan ruang sosial di mana anak-anak laki-laki cenderung lebih terpapar pada pergaulan yang kurang mendukung pendidikan. Beberapa dari mereka mungkin merasa lebih terikat pada kelompok teman yang telah bekerja atau memilih kegiatan yang tidak terikat pada rutinitas sekolah. Kondisi ini menyoroti kebutuhan akan peran komunitas dan lembaga sosial untuk memfasilitasi lingkungan yang lebih positif dan mendukung pendidikan di kalangan remaja laki-laki.

2) Kondisi Disabilitas sebagai Faktor Dominan bagi Anak Perempuan

Untuk anak perempuan di Kota Pekalongan, kondisi disabilitas muncul sebagai penyebab utama tidak bersekolah, dengan 43 anak (28,29%) yang menyatakan bahwa keterbatasan fisik atau mental menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan dengan disabilitas di Kota Pekalongan mungkin menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses pendidikan. Minimnya fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas serta kurangnya dukungan khusus di sekolah-sekolah umum dapat memperparah kondisi ini. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas mungkin masih kuat, membuat keluarga enggan untuk mendorong anak perempuan mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental untuk melanjutkan pendidikan formal.

3) Rasa Malu atau Enggan

Rasa malu atau enggan menjadi alasan ketiga yang signifikan bagi anak-anak tidak bersekolah di Kota Pekalongan. Sebanyak 61 anak laki-laki (19,00%) dan 34 anak perempuan (22,37%) merasa malu atau enggan untuk bersekolah. Faktor ini bisa terkait dengan beberapa hal, seperti ketidakpercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, atau bahkan stigma sosial tertentu. Misalnya, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah mungkin merasa malu untuk bersekolah karena merasa kurang mampu bersaing dengan teman-teman mereka. Hal ini menyoroti pentingnya program dukungan sosial dan konseling di sekolah-sekolah yang dapat membantu anak-anak membangun rasa percaya diri dan mengatasi rasa malu atau cemas terkait lingkungan sekolah.

4) Kurangnya Perhatian atau Dukungan Keluarga

Kurangnya perhatian dan dukungan keluarga juga menjadi faktor penting yang menyebabkan anak-anak di Kota Pekalongan tidak melanjutkan pendidikan. Sebanyak 49 anak laki-laki (15,26%) dan 18 anak perempuan (11,84%) menyatakan kurangnya dukungan dari keluarga sebagai alasan mereka tidak bersekolah. Di Kota Pekalongan, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah atau orang tua yang sibuk bekerja di sektor informal, anak-anak sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk bersekolah. Orang tua mungkin lebih fokus pada kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada mendukung pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah atau organisasi sosial untuk memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

5) Pengalaman Traumatik dan Perundungan

Meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan faktor lain, pengalaman traumatik dan perundungan tetap menjadi penyebab anak tidak bersekolah. Sebanyak 15 anak laki-laki (4,67%) mengalami pengalaman traumatik, dan 13 anak laki-laki (4,05%) mengalami perundungan atau bullying. Di sisi perempuan, sebanyak 8 anak (5,26%) menyatakan perundungan sebagai alasan mereka meninggalkan sekolah. Kota Pekalongan, seperti banyak kota lain, mungkin memiliki kasus perundungan yang belum terpantau dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan trauma dan perundungan perlu ditingkatkan melalui program dukungan psikologis di sekolah-sekolah. Pendekatan yang sensitif dan efektif dalam menangani anak-anak yang mengalami trauma atau perundungan dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk tetap bersekolah.

6) Pernikahan Dini pada Anak Perempuan

Di antara anak perempuan, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab yang cukup signifikan, dengan 12 anak (7,89%) menyatakan bahwa mereka meninggalkan sekolah karena telah menikah. Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan terkait pernikahan dini, yang sering kali didorong oleh faktor ekonomi atau tekanan sosial. Pernikahan

dini di kalangan anak perempuan ini sangat mempengaruhi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, diperlukan program penyuluhan dan kebijakan perlindungan yang lebih kuat untuk mencegah pernikahan dini serta memberikan peluang bagi anak perempuan untuk terus bersekolah.

Berdasarkan analisis faktor sosial penyebab anak tidak sekolah di Kota Pekalongan, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini, antara lain:

1) Penguatan Program Konseling dan Dukungan Psikologis

Sekolah-sekolah di Kota Pekalongan perlu menyediakan program konseling yang khusus menangani kasus anak yang mengalami rasa malu, trauma, atau perundungan. Dukungan ini dapat membantu anak-anak untuk mengatasi masalah psikologis mereka dan merasa lebih nyaman di lingkungan sekolah.

2) Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas untuk Anak Disabilitas

Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperhatikan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas agar anak-anak dengan keterbatasan fisik atau mental dapat bersekolah dengan nyaman. Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan pelatihan bagi guru untuk menangani anak disabilitas akan membantu mengurangi angka ATS di kalangan anak disabilitas.

3) Penyuluhan dan Pendidikan tentang Pentingnya Dukungan Keluarga

Program penyuluhan yang melibatkan orang tua sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran penting keluarga dalam mendukung pendidikan anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat kepada anak-anak mereka.

4) Pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Kesadaran Sosial

Program kesadaran sosial mengenai dampak negatif pernikahan dini harus ditingkatkan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama, pemerintah Kota Pekalongan dapat memberikan edukasi kepada keluarga dan anak-anak perempuan tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan.

5) Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk Anak-Anak yang Terkena Pengaruh Pergaulan Negatif

Pembentukan kelompok dukungan yang melibatkan remaja-remaja di Kota Pekalongan dapat membantu anak-anak yang terdampak pengaruh pergaulan untuk kembali termotivasi dalam bersekolah. Kelompok ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan sosial dan budaya yang positif, sehingga anak-anak mendapatkan alternatif pergaulan yang lebih sehat dan mendukung pendidikan.

4. Aspek Layanan

Berdasarkan data di Kota Pekalongan yang ada pada Tabel 4.5, terdapat beberapa aspek layanan pendidikan yang memengaruhi keputusan anak-anak untuk tidak melanjutkan sekolah. Analisis dari aspek layanan ini mencakup faktor-faktor seperti jarak sekolah, ketersediaan fasilitas sekolah, dan persepsi terkait akses pendidikan. Secara umum, meskipun sebagian besar anak di Kota Pekalongan tidak menyebutkan adanya kendala layanan sebagai alasan utama mereka tidak bersekolah, beberapa anak masih menghadapi kesulitan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak terkait.

Tabel 4.5 Analisis Penyebab ATS Berdasar Aspek Layanan(Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinas Pendidikan dan Kelurahan 2024)



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Analisis ini menunjukkan bahwa aspek layanan pendidikan di Kota Pekalongan, terutama terkait jarak sekolah dan ketersediaan fasilitas, menjadi faktor yang mempengaruhi sebagian kecil anak dalam melanjutkan pendidikan. Meskipun sebagian besar anak tidak melihat layanan pendidikan sebagai hambatan utama, tantangan ini tetap relevan, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan sub urban. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dari pemerintah dan masyarakat

dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, serta memberikan dukungan tambahan bagi keluarga di wilayah-wilayah yang lebih terpencil.

Berikut adalah analisis mendalam terhadap setiap aspek layanan yang relevan di Kota Pekalongan, antara lain:

1) Tidak Ada Masalah yang Menghambat Akses Layanan Pendidikan

Dari data yang diperoleh, mayoritas anak-anak yang tidak bersekolah menyatakan bahwa mereka tidak menghadapi masalah terkait aspek layanan pendidikan. Sebanyak 77,27% anak laki-laki dan 88,89% anak perempuan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hambatan dalam hal jarak sekolah atau fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar anak-anak di Kota Pekalongan, aspek layanan pendidikan bukanlah faktor utama yang mencegah mereka untuk melanjutkan sekolah.

Fakta bahwa sebagian besar anak tidak menyebutkan layanan pendidikan sebagai penghambat mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti aspek sosial, budaya, atau ekonomi, mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi keputusan mereka untuk meninggalkan bangku sekolah. Kota Pekalongan sendiri merupakan kota dengan infrastruktur pendidikan yang cukup memadai di pusat kota, sehingga bagi anak-anak yang tinggal di sekitar pusat kota, akses ke sekolah relatif mudah dijangkau. Namun, meskipun aspek layanan tidak menjadi kendala utama, penting untuk melihat faktor-faktor eksternal lainnya yang memengaruhi minat anak untuk bersekolah, seperti motivasi pribadi, dukungan keluarga, atau pengaruh lingkungan.

2) Jarak Sekolah yang Jauh sebagai Kendala

Sebagian kecil anak, terutama yang tinggal di daerah sub urban atau daerah yang jauh dari akses pusat Kota Pekalongan, menyebutkan bahwa jarak sekolah yang jauh menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan. Sebanyak 18,18% anak laki-laki dan 11,11% anak perempuan mengalami kesulitan untuk mencapai sekolah akibat jarak yang terlalu jauh. Jarak sekolah yang jauh ini seringkali menjadi alasan bagi keluarga untuk tidak mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki akses

transportasi yang memadai atau bagi keluarga yang tidak mampu membiayai transportasi harian.

Kota Pekalongan memiliki wilayah-wilayah yang cukup beragam, termasuk area urban yang padat dan area sub urban yang lebih jauh dari pusat akses. Di daerah sub urban, infrastruktur transportasi mungkin belum cukup memadai untuk menjangkau sekolah-sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggal anak-anak. Anak-anak yang tinggal di daerah ini mungkin harus menempuh perjalanan cukup lama untuk sampai ke sekolah, yang secara langsung mengurangi motivasi mereka untuk terus bersekolah.

Selain itu, keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam membiayai transportasi anak-anak mereka ke sekolah. Hal ini diperparah jika transportasi umum yang ada tidak efisien atau tidak terjangkau bagi siswa. Di sisi lain, bagi beberapa anak laki-laki, jarak yang jauh sering kali membuat mereka lebih memilih bekerja di sekitar lingkungan tempat tinggal, sehingga meninggalkan sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam kasus ini, intervensi dari pihak pemerintah berupa subsidi transportasi atau penyediaan angkutan khusus sekolah dapat menjadi solusi efektif untuk membantu mengatasi masalah jarak ini.

3) Kurangnya Fasilitas Sekolah sebagai Kendala Minor tetapi Bermakna

Meskipun hanya 4,55% anak laki-laki yang menyebutkan kurangnya fasilitas sekolah sebagai hambatan, faktor ini tetap relevan dan perlu mendapatkan perhatian. Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan teknologi, dapat memengaruhi kenyamanan dan kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Anak-anak yang merasa bahwa fasilitas di sekolah tidak memadai mungkin kehilangan minat untuk bersekolah dan lebih memilih untuk bekerja atau melakukan aktivitas lain yang dianggap lebih produktif.

Fasilitas sekolah yang kurang lengkap sering kali membuat pengalaman belajar menjadi kurang menarik dan tidak mendukung proses pembelajaran yang efektif. Di beberapa sekolah yang berada di daerah sub urban Kota Pekalongan, sarana dan prasarana yang tersedia mungkin terbatas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pusat kota.

Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di wilayah tersebut. Ketidakseimbangan fasilitas ini juga dapat membuat anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah merasa tertinggal atau kurang berdaya saing dengan teman-teman sebaya yang bersekolah di tempat dengan fasilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Kota Pekalongan akan sangat membantu meningkatkan minat anak-anak untuk tetap bersekolah.

Berdasarkan analisis terhadap data ini, beberapa rekomendasi kebijakan berikut dapat diimplementasikan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi kendala-kendala layanan pendidikan dan mendorong lebih banyak anak untuk melanjutkan sekolah. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan yang telah disebutkan, diharapkan Kota Pekalongan dapat mengurangi kendala yang dihadapi anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan keluarga akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk tetap bersekolah dan mencapai potensi mereka. Dukungan yang tepat dapat membuat pendidikan lebih inklusif dan merata, serta membantu mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Kota Pekalongan.

Adapun bentuk rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kendala layanan pendidikan di Kota Pekalongan, antara lain:

- 1) Pengadaan Transportasi Sekolah

Pemerintah Kota Pekalongan dapat menyediakan transportasi khusus untuk anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dari sekolah. Program ini dapat berupa bus sekolah yang beroperasi di daerah-daerah dengan akses terbatas, sehingga anak-anak di wilayah sub urban dapat dengan mudah mencapai sekolah tanpa harus menanggung biaya tambahan. Alternatif lainnya adalah memberikan subsidi transportasi bagi siswa yang tinggal jauh, terutama bagi keluarga dengan ekonomi rendah.

2) Program Edukasi tentang Pentingnya Pendidikan

Program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pendidikan, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak keluarga di daerah yang jauh dari pusat pendidikan yang mungkin memandang pendidikan sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting karena terbatasnya akses dan fasilitas. Dengan program edukasi, diharapkan pandangan ini bisa berubah, dan keluarga-keluarga lebih mendukung anak-anak mereka untuk tetap bersekolah.

3) Kolaborasi dengan Komunitas Lokal (Sosial-Keagamaan) untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

Pemerintah Kota Pekalongan dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyediakan solusi yang tepat sasaran, seperti program belajar di rumah atau dukungan masyarakat bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah, seperti pelibatan PKBM, Pondok Pesantren atau komunitas lain yang relevan. Kolaborasi ini dapat melibatkan masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

C. PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEKAN ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DAN ATAU ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKALONGAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Pekalongan dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah dalam rangka menjamin hak setiap masyarakat untuk

mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kota Pekalongan pada khususnya.

Bappenas (2020)¹⁹ turut mendorong komitmen ini melalui penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS di Indonesia (Stranas ATS) guna, "memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia." Stranas ATS ini menjabarkan kompleksitas upaya penanganan ATS di Indonesia di mana berbagai faktor memengaruhi kerentanan seorang anak untuk tidak bersekolah atau putus sekolah, khususnya dalam rentang usia 7–18 tahun. Nantinya, Stranas ini akan dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stranas Penanganan ATS (Juknis Stranas ATS) yang memuat tahapan kegiatan dan langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan Stranas ATS. Secara ringkas, Stranas dan Juknis ATS bertujuan untuk²⁰:

1. Membangun pemahaman tentang situasi ATS di Indonesia.
2. Memetakan tanggung jawab dan kewenangan lintas sektor untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dalam upaya penanganan ATS.
3. Memberikan acuan kerangka pikir strategi penanganan ATS dan panduan untuk pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan solusi penanganan ATS, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ditemukan di daerah masing-masing.
4. Membangun sistem dan menyiapkan kapasitas kelembagaan yang efektif untuk upaya pelaksanaan strategi penanganan ATS di tingkat nasional dan daerah.

Di tingkatan internasional, definisi ATS mengacu pada definisi *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yaitu anak berusia 6–17 tahun dengan kondisi yaitu:

1. Tidak memiliki akses ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka.

¹⁹ Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Strategi Nasional Penanganan ATS*. Jakarta: Bappenas.

²⁰ Ibid. Kementerian PPN/Bappenas. 2020.

2. Tidak terdaftar meskipun sekolah tersebut ada dan dekat.
3. Terdaftar tetapi tidak bersekolah atau tidak mampu untuk belajar ke sekolah dikarenakan diskriminasi berbasis jenis kelamin, kemiskinan, berpindah-pindah tempat, disabilitas, kelompok etnis minoritas, konflik, bencana alam, menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah keluarga, jarak sekolah yang jauh dan menempuh perjalanan berbahaya.

Di tingkat nasional ATS didefinisikan sebagaimana dijabarkan dalam Stranas ATS, yaitu anak berusia 7–18 tahun dengan kondisi berikut.

1. Tidak pernah sekolah;
2. Putus sekolah pada jenjang tertentu; dan
3. Menyelesaikan jenjang tertentu tapi tidak melanjutkan dan sebab-sebab lain seperti kesulitan akses geografi, bencana alam, dan daerah konflik.

Kegiatan pendokumentasian ini kemudian menggunakan definisi ATS sesuai dengan dokumen Stranas ATS, agar mengacu pada konteks lokal serta selaras dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kota Pekalongan ternyata masih ada sekitar 1.400 anak putus sekolah atau 20 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut putus sekolah diantaranya faktor ekonomi keluarga, kurang harmonisnya keluarga, permasalahan di lingkungan sekolah sebelumnya, lebih memilih bekerja untuk tuntutan hidup dan membantu orangtua, lingkungan sekitar, dan sebagainya²¹.

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kota Pekalongan tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana

²¹ Catatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Pekalongan yang diselenggarakan pada Kamis, 18 Juli 2024.

pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program kesetaraan melalui Sanggar Kelompok Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah daerah Kota Pekalongan di bidang pendidikan tentunya sesuai dengan visi dan misi Kota Pekalongan yakni meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu terhadap layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan, utamanya SD, SMP dan SMA seiring dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan²², yang telah diberikan kepada setiap masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak setiap masyarakat akan pendidikan.

Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kota Pekalongan. Salah satu indikator paling penting guna peningkatan mutu pendidikan di Kota Pekalongan yakni penganggaran untuk membantu proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan, dan diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah yang terjadi di Kota Pekalongan²³. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada. Selain itu juga

²² Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, dan SMP/MTs yang mencakup program Paket A dan Paket B. (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

²³ Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan memberi pertimbangan bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar disatuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;

telah diupayakan melalui berbagai kerjasama²⁴ dan program-program lainnya yang selaras, seperti penelitian dan lainnya.

Di antara faktor-faktor penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) dan atau putus sekolah, kiranya faktor ekonomi terkadang menjadi faktor yang paling sering ditemui. Permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, maka optimalisasi pemberian beasiswa perlu terus didorong menjadi alternatif kebijakan. Dikatakan optimalisasi, karena secara faktual pemerintah sudah melaksanakan kebijakan pemberian beasiswa. Permasalahannya adalah belum meratanya, mekanisme, dan sistem pemberian dana. Oleh karenanya, perlu ada upaya pembenahan sistem pemberian beasiswa. Siapa, bagaimana caranya, dan untuk apa pemanfaatannya adalah beberapa hal yang mesti direvitalisasi. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan beberapa perwakilan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)²⁵ Kota Pekalongan terkait perlunya mengoptimalkan dari segi pendataan siswa yang seharusnya dan selayaknya mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk meringankan beban orang tua dan sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.

Selain mengeluarkan kebijakan dan program di bidang pendidikan, pemerintah daerah sebenarnya juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat.²⁶ Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi. Kondisi anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atasi melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat terhadap

²⁴ Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bapperida bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) terus berkomitmen untuk mengentaskan Anak Putus Sekolah (APS), salah satunya dengan membentuk Relawan Totalitas Upaya Nyata Entaskan Anak Tidak Sekolah (TUNTAS) yang secara langsung diresmikan oleh Walikota Pekalongan. Diakses melalui <https://pekalongankota.go.id/berita/komitmen-entaskan-anak-putus-sekolah-pemkot-bentuk-relawan-tuntas.html>.

²⁵ Ibid, FGD 2024.

²⁶ Ibid, FGD 2024.

pendidikan yaitu, pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar belakang pendidikan tetapi dapat hidup layak.²⁷ Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah daerah juga melakukan berbagai pendekatan yang telah bekerja sama dengan perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, hingga keterlibatan program kesetaraan melalui Sanggar Kelompok Belajar (SKB) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan di atas, dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kota Pekalongan, menurut tim peneliti mengenai beberapa kebijakan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan atau putus sekolah sehingga perlunya analisis mendalam terhadap berbagai program pendukung yang belum terealisasi secara optimal. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini Kecamatan maupun Kelurahan dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor utama dalam mensosialisasikan penuntasan anak tidak dan atau putus sekolah sebagai bentuk pentingnya pendidikan bagi setiap anak untuk peningkatan kualitas masyarakat yang belum merata, terlihat dari masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

D. STRATEGI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DAN ATAU ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKALONGAN

Proses pengembalian Anak Tidak Sekolah ATS ke dalam sistem di sekolah membutuhkan strategi yang lebih kompleks dibandingkan pencegahan. Strategi penanganan ini memerlukan beberapa tahapan, seperti pendataan ATS secara komprehensif, konfirmasi kemauan ATS untuk kembali bersekolah, proses pengembalian ke dalam sistem persekolahan, maupun penyetaraan di PKBM, dan pemantauan siswa yang kembali bersekolah. Hal ini tentu berimplikasi pada dana dan waktu yang intensif. Begitupun dengan keterlibatan beragam aktor pemerintah dan nonpemerintah yang saling terkait, di antaranya Bappeda/Baperlitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, sekolah, serta organisasi massa (ormas) pemerhati pendidikan dan PKBM.

²⁷ Ibid, FGD 2024.

Implementasi strategi penanganan ATS telah dipraktikkan dalam tiga inovasi dukungan. Peneliti meyakini berbagai program dan gerakan-gerakan baik swadaya maupun tersistem dan kelembagaan akan memiliki andil besar terhadap penanganan ATS di Pekalongan. Strategi penanganan ATS berupaya mengembalikan siswa ke dalam sistem Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang secara kualitas inferior dibandingkan sekolah formal. Ringkasan analisis FGD tentang PKBM di Kota Pekalongan menemukan bahwa PKBM minim sumber pendanaan, motivasi dan kompetensi pengelolanya rendah, PKBM belum bisa memanfaatkan alat keterampilan yang ada, program yang diselenggarakan belum optimal, belum ada kelanjutan program, kemampuan metode pembelajaran tutor masih kurang optimal, pemanfaatan media pembelajaran masih kurang, serta motivasi dan persentase kehadiran peserta didik rendah. Dari sisi peserta didik, siswa yang masuk ke PKBM melalui program penanganan ATS disebabkan umur ATS yang sudah tidak sesuai dengan usia sekolah formal terakhir yang diikutinya, dan terdapat preferensi ATS untuk tetap bekerja sambil bersekolah. Oleh karena itu, prinsip fleksibilitas menjadi penting untuk terus membuat anak bertahan di sekolah dan tidak kembali putus sekolah. Terkait hal ini, faktor psikologis seperti malu karena lebih tua daripada teman sekelasnya dan faktor kognitif seperti sulitnya menyerap pelajaran di sekolah juga perlu menjadi pertimbangan khusus dalam implementasi strategi penanganan ATS.

1. Desain Program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS

Implementasi inovasi penanganan ATS di Kota Pekalongan dapat dibedakan berdasarkan empat aspek, yaitu inisiator, ketersediaan dan pengembangan peta jalan, institusi pemimpin, dan cakupan implementasi program. Adanya PKBM yang diinisiasi oleh ormas dan individu, Sedangkan, SKB diinisiasi oleh pemerintah daerah (Bappeda dan Dinas Pendidikan) dan memiliki peta jalan mulai dari perencanaan hingga pemantauan. Hal ini berimplikasi berbeda dalam proses berjalannya dan cakupan implementasi program.

Peta jalan membantu pelaku inovasi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan inovasi dengan lebih sistematis, sehingga program inovatif menjadi lebih efektif dan luas. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program di PKBM, di mana cakupan implementasi program dapat menjangkau sebagian bahkan seluruh kecamatan hingga kelurahan.

Selain itu, keberadaan Bappeda dalam struktur tim utama penanganan ATS di level kabupaten memungkinkan adanya prioritas pengerjaan rancangan peraturan daerah (raperda), penganggaran penanganan ATS ke dalam APBD menjadi lebih cepat, serta kemudahan pengorganisasian komitmen lintas sektor. Dalam hal ini, adanya PKBM mencerminkan dua hal tersebut yaitu memiliki peta jalan dan digerakkan secara langsung oleh Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Tim PKK. Hasilnya, program ini dalam waktu singkat dapat menjangkau hampir seluruh kelurahan yang ada.

Tabel 4.6 Inisiator, Roadmap, Institusi Pemimpin, dan Penyebaran Inovasi

No	Inisiator	Roadmap	Institusi Pemimpin	Inovasi
1.	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)	Belum Ada	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 13 PKBM di seluruh Kota Pekalongan dengan sebaran yang cukup merata. - Di antaranya 4 PKBM di Kec. Pekalongan Timur; 4 PKBM di Kec. Pekalongan Barat; 4 PKBM di Kec. Pekalongan Utara; dan 2 PKBM di Kec. Pekalongan Selatan.
2.	Sanggar Kelompok Belajar (SKB)	Sudah Ada	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah membuat jaringan Pokjar atau Kelompok Belajar di beberapa tempat seperti di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kidul, dan lainnya. - Sudah melakukan sosialisasi di 14 Kelurahan (dari 27 Kelurahan) antara lain Kauman, Poncol, Noyontaansari, Kandang Panjang, Krapyak dan lainnya.
3.	Relawan Totalitas Upaya Nyata Entaskan Anak Tidak Sekolah (TUNTAS)	Sudah Ada	Bapperida bersama United Nations Children's Fund (UNICEF)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemkot Pekalongan bersama UNICEF melakukan pendampingan untuk mengatasi anak putus sekolah dengan cara melakukan pendataan yang dikelompokkan sesuai dengan penyebabnya. - Kemudian dilakukan penindakan untuk disekolahkan

				kembali baik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) maupun sekolah formal sesuai penyebab anak putus sekolah.
--	--	--	--	--

Sumber: Rangkuman hasil FGD dan tinjauan dokumen (2024)

2. Bentuk Kelembagaan dari Inovasi Penanganan ATS

Keberadaan kelembagaan dari inovasi penanganan ATS beragam berdasarkan keterlibatan aktor dan model struktur di level pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan. Kelembagaan tersebut biasanya mengimplementasikan model hierarki berjenjang mulai dari level pemerintah kota hingga kelurahan. Di level pemerintah kota, Bappeda/Baperlitbangda adalah aktor utama yang berperan menjalankan fungsi koordinasi, sedangkan Dinas Pendidikan menangani teknis pelaksanaan. Selain aktor pemerintah, aktor nonpemerintah pun berperan penting dan dapat memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda dalam setiap bentuk inovasi penanganan ATS. Dalam beberapa praktik, aktor pemerintah dan nonpemerintah berkolaborasi dalam satu tim kerja, sehingga implementasi program berjalan dengan optimal.

Kelembagaan idealnya memiliki Satuan Kerja (Satker) dalam struktur kelembagaan pelaksana program yang merupakan gabungan antara organisasi pemerintah dan nonpemerintah (ormas). Satker berkedudukan di tingkat pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan; termasuk di dalamnya adalah Bappeda/Bapperlitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, unsur pemerintah kecamatan dan desa, dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP).

Dalam pelaksanaan inovasi, lembaga-lembaga nonpemerintah berbasis keagamaan yang memiliki program pendidikan seperti Pimpinan Muslimat Nahdatul Ulama (NU), Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah dan organisasi lainnya di Kota Pekalongan harus turut aktif terlibat dan berada dalam struktur kelembagaan. Hal ini dianggap perlu karena ketokohnya dapat mendorong penguatan keberhasilan program penanganan ATS. Selain itu, ada pula Forum CSR di Kota Pekalongan, yang dapat berkontribusi dalam pendanaan. Inovasinya juga perlu melibatkan perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia di Kota Pekalongan dalam struktur kelembagaan

program, yang diharapkan dapat mendorong pengembangan dan pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Peran masing-masing aktor dalam struktur kelembagaan program inovasi ATS dapat terlihat dari tanggung jawab dan fungsi di tiap tahapan program, mulai dari proses penguatan regulasi, pendataan, monitoring, evaluasi dan pembiayaan ATS yang kembali ke sekolah serta evaluasi pasca pengembalian ATS ke sekolah. Bappeda dan Dinas Pendidikan berperan dalam mengawal rancangan peraturan daerah (raperda) hingga disahkan menjadi peraturan Walikota tentang rintisan wajib belajar 12 tahun dan kerangka penanganan ATS, serta penyusunan struktur kelembagaan pelaksanaan program.

3. Pelaksanaan Pendataan pada Inovasi Penanganan ATS

Pengumpulan data ATS adalah proses yang dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga pemerintah kota. Akan tetapi, variasi dalam proses pendataan ini bergantung pada profil aktor dan pelaksana program, ketersediaan sistem dan basis data yang digunakan, serta sumber pendanaan untuk pendataan.

Sebagai contoh, di Kabupaten Brebes, sistem pendataan jumlah ATS dipilah berdasarkan jenis kelamin, itu semua terdapat dalam Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang dipromosikan oleh UNICEF bersama pemerintah daerah. Bahkan, pada pendataan terakhir anggaran desa telah menjadi sumber pendanaan. Profil ATS per desa, per kecamatan, dan agregat kabupaten berdasarkan jenis kelaminnya dapat ditampilkan dan diakses dalam *dashboard* SIPBM Kabupaten Brebes. Data ATS berdasarkan nama dan alamat tinggal juga tersedia di level desa dan digunakan untuk keperluan perencanaan mikro pengembalian ATS ke sistem pendidikan. Untuk keperluan konfirmasi kemauan ATS kembali bersekolah. Data SIPBM tersebut dijadikan input ke dalam proses rekonfirmasi data ATS tadi melalui aplikasi ODK Collect & Aggregate. Fitur tambahan ini sudah diujicobakan di lima kecamatan di Brebes, yakni Bantarkawung, Paguyangan, Wanasari, Kersana dan Larangan. Adapun sumber dana untuk uji coba fitur tersebut berasal dari APBD Kabupaten.

Berbeda dengan Kabupaten Brebes yang telah memiliki basis data terdesentralisasi di server desa, data di Kota Pekalongan memungkinkan

masih tersentralisasi di Bappeda atau Dinas Pendidikan. Meskipun demikian, data ATS berbasis nama dan alamat tinggal dapat dengan mudah dibagikan ke masing-masing kecamatan dan desa. Sentralisasi data ini cocok dengan struktur kelembagaan gerakan penanganan ATS memang lebih digerakkan oleh pemerintah daerah. Dari pengalaman di Kabupaten Brebes, diperlukan waktu satu tahun untuk melakukan desain dan implementasi sensus ATS ke seluruh desa menggunakan aplikasi SIPBM yang berbasis android dan web. Hasilnya kemudian dipergunakan untuk konfirmasi sampai tahap pemantauan dan evaluasi pada tahun ajaran berikutnya.

E. Penguatan Tata Kelola Penanganan dan Pencegahan ATS

Aspek tata kelola penanganan dan pencegahan ATS telah menjadi prioritas pembangunan dalam sektor pendidikan. Dalam laporan akhir ini, tim peneliti menempatkan aspek tata kelola dilihat dari empat komponen, sebagai berikut:

1. Peraturan Tata Kelola ATS

Beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia telah mengesahkan peraturan Bupati/Walikota untuk rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun. Rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun ini diperlukan agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran untuk penanganan ATS berusia SD sampai SMA. Selain itu, di Kota Pekalongan telah disahkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan.

Dari hal di atas, tim peneliti menilai pada klausul menimbang yang ada Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019 menegaskan "*bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar disatuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B*

dan Program Paket C Kota Pekalongan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan". Kemudian dilanjutkan dengan mengaskan bahwa "agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan kepadawarga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di KotaPekalongan dalam Peraturan Walikota". Pada bagian akhir ditutup dengan pengasan bahwa "berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan. Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Program Peket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan".

Adanya Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019 telah menjadi payung hukum bagi implementasi, penganggaran, dan alokasi sumber daya. Hal tersebut menunjukkan lingkungan regulasi yang kondusif untuk pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan. Regulasi dan anggaran tersebut ditunjang dengan adanya panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan inovasi di kawasan Kota Pekalongan.

2. Anggaran

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan di Kota Pekalongan digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk mekanisme pendataan ATS, pelatihan tim fasilitator/guru untuk replikasi, serta bantuan langsung tunai dan paket peralatan sekolah untuk meringankan beban finansial orang tua dari ATS yang bersekolah kembali. Dalam praktiknya, sumber anggaran utama berasal dari pemerintah pemerintah kota, namun tim peneliti belum mendapatkan konfirmasi mengenai penggunaan anggaran di pemerintah kelurahan (dana kelurahan). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas diperlukan agar pelaksana inovasi dapat mengakses sumber pendanaan lain, seperti dana perusahaan swasta melalui alokasi *corporate social responsibility* (CSR).

3. Kelembagaan Lintas Sektor

Implementasi strategi pencegahan dan penanganan ATS telah melibatkan kelembagaan lintas sektor yang diprakarsai oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan. Hal ini memunculkan antusiasme aktor-aktor kunci nonpemerintah lain, termasuk ormas pendidikan dan institusi PKBM untuk memperkuat tata kelola penanganan ATS.

4. Sistem Pendataan

Salah satu pembelajaran penting dalam tata kelola implementasi strategi penanganan dan pencegahan ATS adalah terbentuknya sistem pendataan yang sistematis. Sistem pendataan itu mencakup verifikasi data ATS dari data yang tersedia di pemerintah kota, melakukan konfirmasi kemauan ATS kembali ke sistem persekolahan, serta monitoring bertahannya ATS setelah kembali ke sekolah. Sistem pendataan yang lebih komprehensif, termasuk pemantauan, melibatkan pemerintah desa dan kecamatan agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.

F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TATA KELOLA PENANGANAN DAN PENCEGAHAN ATS

Dari capaian hasil sementara, penelitian ini mencoba memetakan berbagai faktor yang memengaruhi tata kelola Penanganan dan Pencegahan ATS, sebagai berikut:

1. Intervensi pada Akar Masalah

Perlu didorong adanya inovasi kebijakan yang terbuka untuk mendorong masuknya pencegahan dan penanganan ATS ke dalam prioritas pembangunan pendidikan di tingkat lokal, seperti Kecamatan dan Kelurahan, bahkan oleh organisasi nonpemerintah. Oleh karena itu, prioritas yang kuat melalui keterlibatan multiaktornya perlu ditingkatkan. Baik dari sisi *supply* dan *demand*, tata kelola penanganan dan pencegahan ATS akan mampu secara efektif menysar akar masalah ATS.

- Sisi penyedia (*supply*). Strategi pencegahan ATS menekankan pada ketersediaan sistem pembelajaran yang fleksibel yang memungkinkan siswa tetap belajar di luar waktu dan ruang kelas. Meskipun hal ini menimbulkan berbagai biaya tambahan, seperti biaya pembuatan

lembar kerja siswa yang sederhana, pelatihan guru, insentif untuk guru, dan risiko berkurangnya kualitas pembelajaran karena siswa tidak selalu didampingi guru dalam proses pembelajarannya. Sementara untuk strategi penanganan ATS menekankan pada sistem pembelajaran yang akomodatif terhadap kondisi ATS termasuk ATS yang bekerja (melalui PKBM) dan ATS dengan disabilitas (melalui sekolah inklusi).

- Sisi permintaan (*demand*). Adanya intervensi terhadap hambatan psikologis anak melalui advokasi terhadap anak dan orangtua (keluarga), serta intervensi secara finansial melalui bantuan langsung tunai dan perangkat sekolah untuk ATS yang kembali bersekolah.

2. Intervensi pada Tata Kelola Program

Penanganan dan pencegahan ATS harus berfokus pada perbaikan tata kelola, sehingga berimplikasi pada kualitas program, di antaranya:

- a. Adanya penguatan regulasi di level kebijakan pemerintah kota tentang penuntasan pendidikan 12 tahun dengan harmonisasi program antara pemerintah kota dengan provinsi untuk jenjang SMA dan SMK.
- b. Adanya kelembagaan program penanganan ATS yang dipimpin langsung oleh Bappeda untuk koordinasi kebijakan, dan Dinas Pendidikan untuk teknis pelaksanaan, seperti pendataan, proses pengembalian ATS ke sekolah, pemantauan, dan pelaporan.
- c. Tersedianya anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa, yang diperkaya oleh CSR dan sumber-sumber dana lain.
- d. Tersedianya sistem pendataan yang komprehensif dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan penanganan ATS.
- e. Tersedianya mekanisme dan prosedur penanganan ATS yang terdokumentasi, dengan cakupan mulai dari desain hingga pemantauan dan evaluasi keberhasilan inovasi.
- f. Adanya regulasi pendukung lainnya, seperti Peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat; Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul; Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan

Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Dana CSR, terutama yang secara spesifik mengatur urusan pendataan dan penanganan ATS.

3. Faktor-Faktor Penghambat

Meskipun tata kelola penanganan dan pencegahan ATS telah menunjukkan hasil yang diharapkan, teridentifikasi pula beberapa faktor penghambat tata kelola, yaitu:

- a. Faktor eksternal, seperti masalah banjir yang mengharuskan pemerintah daerah memfokuskan anggaran dan sumber daya untuk urusan penanggulangan bencana daripada urusan yang lainnya (skala prioritas).
- b. Belum optimalnya bentuk koordinasi lintas sektor.
- c. Masih belum harmonisnya regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten terkait wajib belajar 12 tahun, sehingga penanganan ATS untuk usia SMA ke atas menjadi terkendala oleh regulasi dan anggaran.
- d. Untuk kasus Anak Disabilitas Tidak Sekolah (ADTS), ditemukan kendala sisi suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, teridentifikasi masih lemahnya regulasi terkait berbagai hal, misalnya perekrutan guru, investasi sarana fisik untuk sekolah inklusi dalam melayani anak disabilitas tidak sekolah yang mayoritas belum pernah bersekolah. Sementara itu, dari sisi permintaan, ditemukan adanya hambatan psikologis pada anak dan orang tua khususnya untuk anak yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusi. Hal itu terjadi karena mayoritas ADTS belum pernah bersekolah sekalipun telah berusia remaja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, permasalahan ATS di Kota Pekalongan memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tantangan kewilayahan di setiap kecamatan. Melalui implementasi rekomendasi yang terfokus pada penyelesaian kendala ekonomi, aksesibilitas pendidikan, motivasi belajar, dan pola pikir keluarga, diharapkan angka ATS di Kota Pekalongan dapat berkurang secara signifikan. Program intervensi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah hingga keluarga, akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan bagi setiap anak, serta memastikan bahwa hak pendidikan dapat diakses oleh seluruh anak di Kota Pekalongan. Kolaborasi dan komitmen dari semua pihak menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi ini, sehingga generasi muda Pekalongan dapat tumbuh dengan akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Laporan akhir mengenai kajian Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan ATS di wilayah ini. Data menunjukkan bahwa angka ATS mencapai 1,195 anak yang tersebar di empat kecamatan: Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik dan faktor penyebab ATS yang unik, mulai dari kendala ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bekerja, pengaruh lingkungan dan motivasi belajar yang rendah, hingga aksesibilitas terhadap pendidikan yang terbatas. Faktor budaya juga berperan penting, di mana terdapat pandangan di beberapa keluarga yang kurang mendukung pendidikan formal bagi anak-anak mereka, menganggap bahwa pendidikan bukan prioritas atau relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah melakukan penguatan regulasi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program

Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan. Adanya Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019 telah menjadi payung hukum bagi implementasi, penganggaran, dan alokasi sumber daya. Hal tersebut menunjukkan lingkungan regulasi yang kondusif untuk pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan. Regulasi dan anggaran tersebut ditunjang dengan adanya panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan inovasi di kawasan Kota Pekalongan.

Pada dasarnya pencegahan dan penanganan ATS dapat dilihat sebagai program yang secara langsung menangani isu kerentanan dan menysasar kelompok rentan. Hal ini menekankan pentingnya desain dan pelaksanaan program yang sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan sasaran, khususnya ATS dan keluarganya. Dalam laporan akhir ini ditemukan beberapa praktik yang dilakukan untuk memastikan keseluruhan proses yang inklusif, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan, dengan beberapa catatan untuk perbaikan ke depan.

Dalam proses pengembangan desain inovasi, keterlibatan para pembuat kebijakan ataupun inovator/penggagas teridentifikasi menjadi salah satu upaya untuk memastikan adanya perspektif inklusif (gender dan disabilitas) yang berimbang. Peran kuat tokoh perempuan dalam gerakan dan pengembangan kompetensi utama dari inovasi tata kelola ATS di Kota Pekalongan. Fakta ini tentunya akan memperkuat upaya pengembangan dan pelaksanaan program yang inklusif, yang secara sistematis membawa perspektif dan pengalaman dari para perempuan ini dalam pengelolaan program. Lebih jauh, kesempatan yang berimbang untuk para perempuan pembuat kebijakan tampil dalam kegiatan-kegiatan utama program/inovasi, diharapkan akan merefleksikan semangat yang sama dalam implementasi program ATS, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk kembali ke sekolah dan berprestasi.

Laporan akhir ini juga mencatat bahwa inovasi yang dilakukan mengintegrasikan beberapa komponen sebagai upaya untuk mengembangkan program yang inklusif disabilitas. Pelibatan peran pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas misalnya dilakukan PKBM Bunga Bangsa, berani memberi kepastian bahwa penyandang disabilitas

punya hak sama untuk mendapatkan pendidikan. Sistem pendataan yang dikembangkan pun sudah mencakup anak dengan disabilitas. Upaya lain yang teridentifikasi yakni telah dilakukannya inovasi yang sensitif gender dan inklusi sosial adalah sistem pendataan dan pengelolaannya berdasarkan data berjenjang, terpilah, baik berdasarkan jenis kelamin, dan juga jenis disabilitas anak, yang akan memudahkan upaya mengidentifikasi kebutuhan mereka.

Terlepas dari semua upaya yang dilakukan, pendokumentasian penelitian ini juga mencatat perlunya penguatan aspek inklusif disabilitas dalam semua inovasi, karena sekalipun informasi disabilitas sudah tercakup dalam sistem pendataan, kinerja pengembalian anak disabilitas tidak sekolah belum cukup kuat dalam impelementasinya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masih lemahnya sisi *supply* layanan pendidikan untuk anak disabilitas. Sementara itu, gerakan sekolah inklusi masih dalam tahap embrio di Pekalongan.

Regulasi sekolah inklusi sudah tersedia tetapi belum diikuti dengan perekrutan guru dan penyesuaian sarana prasarana sekolah yang nyaman bagi anak disabilitas. Dalam hal ini sekolah-sekolah inklusi masih minim memiliki guru yang kompeten untuk mengajar anak disabilitas. Demikian pula, penyemaian nilai kepada siswa bahwa anak dengan disabilitas juga memiliki hak belajar dan talenta yang unik, belum menjadi muatan penting dalam advokasi, sehingga anak dengan disabilitas masih malu atau takut karena rentan diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Dari sisi permintaan, kebanyakan anak disabilitas tidak sekolah belum pernah bersekolah sekalipun mereka sudah berumur remaja. Karenanya, dibutuhkan kekuatan psikologis yang besar bagi mereka untuk memulai langkah pertamanya ke sekolah. Senada dengan itu, hambatan lainnya adalah keadaan psikologis orangtua yang tidak yakin bahwa anak dengan disabilitas mampu belajar di sekolah. Faktor-faktor di atas perlu menjadi bagian penting dalam advokasi dan penyediaan layanan pendidikan bagi ATS dengan kebutuhan khusus di masa depan.

B. REKOMENDASI

Hasil laporan akhir mengenai studi tata kelola penanganan dan pencegahan ATS, rekomendasi dapat diberikan kepada berbagai pihak untuk

dimanfaatkan bagi berbagai tujuan. Rekomendasi untuk penguatan tata kelola penanganan dan pencegahan ATS, antara lain:

1. Perlunya penguatan kolaborasi penanganan ATS multipihak dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta memastikan pemahaman tugas dan fungsi antarlevel pemerintah. Agar meningkatkan kolaborasi multisektor dilakukan melalui melibatkan yang lebih intensif dari kecamatan dan kelurahan, serta memastikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dilakukan melalui refleksi dan inovasi yang berkelanjutan, agar gerakan pengembalian ATS selalu menyesuaikan dengan keragaman konteks lokal.
2. Penekanan pada upaya penting penanganan ATS, yaitu pada sistem manajemen data ATS, termasuk data ATS penyandang disabilitas. Proses pengelolaan data pada saat pendataan (data awal), rekonfirmasi (update per tahun), dan monitoring ATS (update per semester) harus melibatkan pemerintah kelurahan untuk memastikan akurasi data.
3. Karena proses pengembalian ATS ke bangku sekolah adalah hasil antara, disarankan agar penguatan monitoring ATS yang sudah kembali bersekolah terus dilakukan sampai anak tersebut menamatkan pendidikannya. Untuk efisiensi waktu dan biaya, proses pendataan dan konfirmasi kemauan ATS bersekolah dapat didesain untuk terintegrasi dalam satu tahapan sensus pada awal inovasi. Hal ini akan mempermudah proses penargetan pengembalian ATS ke sistem persekolahan dan advokasi untuk penganggarannya.
4. Perlunya penyajian sistem manajemen data ATS berbasis teknologi sebagai upaya efektivitas, efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Agar terus mengoptimalkan sistem manajemen data ATS yang akurat berbasis teknologi, termasuk untuk data ATS penyandang disabilitas. Adopsi teknologi pendataan yang murah tapi efisien berbasis web dan android harus dapat diakses oleh publik dan multiaktor, termasuk sekolah dan PKBM penerima ATS yang kembali bersekolah.
5. Penguatan regulasi masih dibutuhkan untuk memastikan harmonisasi kebijakan dari pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan untuk

menjamin penyediaan pendanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

6. Agar dilakukan penguatan layanan sekolah inklusi melalui penguatan regulasi, perekrutan guru untuk mengajar anak dengan disabilitas, investasi pada sarana fisik sekolah inklusi yang ramah bagi disabilitas anak, serta advokasi luas baik pada anak sekolah, ATS, maupun orang tua.
7. Mendata inisiatif-inisiatif lokal pencegahan yang ada, untuk kemudian diperbesar skalanya dan dilembagakan di bawah kepemimpinan Bapperida dan Dinas Pendidikan. Dengan begitu dukungan pendanaan dari APBD pemerintah kota dan sumber dana lain akan lebih mudah didapatkan.
8. Aspek tata kelola yang wajib tersedia dalam pengembangan upaya inovasi adalah hal-hal berikut ini:
 - a. Regulasi
 - b. Anggaran
 - c. Struktur kelembagaan
 - d. Mekanisme pelaksanaan
 - e. Sistem pendataan anak rentan putus sekolah dan ATS yang inklusif.

Untuk menangani permasalahan ATS ini secara efektif, laporan ini juga merekomendasikan beberapa intervensi strategis yang spesifik dan berbasis kewilayahan dengan pendekatan etnografi. Berikut adalah rangkuman rekomendasi utama yang diajukan menjadi kebijakan, antara lain:

1. Program Bantuan Ekonomi dan Pemberdayaan Keluarga

Di kecamatan dengan latar belakang ekonomi rendah, seperti Pekalongan Barat dan Pekalongan Utara, banyak keluarga yang mengandalkan pendapatan dari sektor informal, sehingga anak-anak sering kali terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program bantuan ekonomi langsung serta pelatihan keterampilan bagi orang tua agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan adanya peningkatan ekonomi keluarga,

diharapkan anak-anak dapat kembali berfokus pada pendidikan tanpa perlu khawatir tentang kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Subsidi Transportasi dan Aksesibilitas Pendidikan

Di beberapa wilayah, khususnya di Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur, akses ke sekolah masih menjadi kendala karena jarak dan terbatasnya transportasi umum. Untuk itu, penyediaan subsidi transportasi atau layanan bus sekolah dapat membantu mengurangi hambatan ini. Program ini akan sangat membantu anak-anak di wilayah pesisir dan daerah yang kesulitan atau minim akses sekolah akibat jarak. Selain itu, penyediaan program pendidikan alternatif seperti kejar paket atau kelas sore dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang terpaksa bekerja pada siang hari.

3. Peningkatan Motivasi Belajar dan Program Konseling Terpadu

Di kecamatan seperti Pekalongan Timur, di mana faktor lingkungan dan pergaulan memiliki pengaruh besar, diperlukan program konseling terpadu dan bimbingan motivasi bagi siswa. Layanan bimbingan konseling di sekolah-sekolah perlu diperkuat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuda yang bisa menjadi panutan. Kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan bimbingan karir sejak dini juga dapat menumbuhkan minat dan motivasi anak-anak untuk terus bersekolah. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak lebih termotivasi untuk belajar dan melihat pentingnya pendidikan untuk masa depan .

4. Program Penyuluhan dan Edukasi bagi Orang Tua

Di beberapa kelurahan, terutama di Kecamatan Pekalongan Selatan, pola pikir orang tua yang masih kurang mendukung pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diadakan program penyuluhan dan edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak. Program ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan PKBM untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Edukasi yang berkelanjutan bagi orang tua akan membantu mengubah pandangannya, sehingga kembali mendukung penuh pendidikan anak-anak.

5. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penanganan ATS

Mengingat kompleksitas masalah ATS di Kota Pekalongan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan ATS. Pemerintah Kota Pekalongan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan/PKBM/Pondok Pesantren, organisasi non-pemerintah/LSM, dan sektor swasta untuk menjalankan program intervensi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini dapat mencakup dukungan pendanaan, penyediaan tenaga pendamping, hingga pengembangan program yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Yulia dan Elfindri. 2009. *Strategi Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Level Rumah Tangga di Kabupaten Pasaman*. Jurnal FE Unand. Vol 9 No.3, 23-35.
- Ansell, C., & Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum03>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia*. Jakarta.
- Berlian, Nur; dan Venus Ali, 2011. *Faktor-Faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jurnal Pendidikan & Kebudayaan, Vol 17 No.1, 43-55.
- Bitterman, P., & Koliba, C. J. 2020. *Modeling Alternative Collaborative Governance Network Designs: An Agent-Based Model of Water Governance in the Lake Champlain Basin, Vermont*. Journal of Public Administration Research and Theory, 30(4), 636–655. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa01>
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daliyo et. al. 1998. *Pekerja Anak dan Perencanaan Pendidikan di Nusa Tenggara Barat dan Timur*. Policy Paper No. 7. Jakarta: AisAID.
- Daan, Dimara. 1985. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pendidikan*. Yogyakarta. U.P.Spring.
- Duranti, A. 1997. *Lingusitic Anthropology*. California: Cambridge University Press.

- Dwiyanto, A. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. UGM Press.
- Fathul, Kamil. 2006. *Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat SMP Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2005*. Bandar Lampung. FKIP Pendidikan Geografi Universitas Lampung.
- Fitriana, Nur Itsnaini. 2015. *Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta*.
- Hammersley, M. and P. Atkinson. 2007. *Ethnography Principles in Practice*. Cambridge. University Press: London, UK.
- Hanifah, Ninip. 2010. *Penelitian Etnografi dan Penelitian Grounded Theory*. Jakarta: Akademi Bahasa Asing Borobudur.
- Hasanah, Y. M., & Safruddin. 2017. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 5(2), 228–239.
- Irwanto. 2017. *Risk and Benefit of Early Age Schooling In: The Impact of Lifestyle Modernization in Child Health Services*. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga: Surabaya.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Malik, H. K., & Sumarno, S. 2016. *Kepedulian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Untuk Menyelesaikan Program Wajar 9 Tahun*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3 (1), 38. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8061>.
- Mujiati, M., Nasir, N., & Ashari, A. 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah*. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 18(3), 271–281. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v18i3.1870>.

- Murnane, Richard J. 2013. *U.S. High School Graduation Rates: Patterns and Explanations*. *Journal of Economic Literature* 2013, 51(2), 370–422.
- Pacheco-Vega, Raul, dan Kate Parizeau (2018), *Doubly Engaged Ethnography: Opportunities and Challenges When Working with Vulnerable Communities*, The International Institute for Qualitative Methodology (IIQM) at the University of Alberta. Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1609406918790653>
- Purnomo, Adi Saputro. 2009. *Faktor Faktor Penyebab Anak Usia Sekolah Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar*. FISIP Universitas Negri Semarang.
- P. Atkinson dan M. Hammersley. 1994. *Etnography and Participant Observation- Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Shabri. 2014. *Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh*. *Jurnal Pencerahan Majelis Pendidikan Daerah Aceh*. Volume 8, Nomor 1. Halaman 15-37
- Spradley, James P. 1980. *Partisipant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- TUNTAS. 2024. Bapperida bersama United Nations Children's Fund (UNICEF). Di akses dari https://tuntas.pekalongankota.go.id/halaman_awal.php, pada tanggal 24 Oktober 2024.
- UNICEF. 2016. *Hasil survey UNICEF Penyebab Anak Tidak Sekolah*. Di akses dari <https://cpps.ugm.ac.id/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia-cn-n-indonesia/>, diakses pada tanggal 24 April 2024.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pelaksana/Inisiator Kebijakan



Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pelaksana Pembelajaran



Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran di PKBM Tondano



Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran di PKBM Cerdas



Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran di Ummi Aminah



Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran di Bunga Bangsa

